

Visi Indonesia 2050

Kontribusi Sektor Bisnis bagi Indonesia Masa Depan



Dokumen 2:
Visi dan Peta Jalan Indonesia 2050

September 2015

Visi Indonesia 2050: Kontribusi Sektor Bisnis bagi Indonesia Masa Depan

“Masa depan itu tak tertulis, namun bagaimana kita membayangkannya bisa mempengaruhi sikap dan perilaku kita saat ini, sebagaimana masa lalu perorangan dan kolektif menjadikan siapa kita, dan bagaimana kita bertindak sekarang ini,...”

Richard Watson, dalam Pengantar The Future - 50 Ideas You Really Need To Know, Quercus, 2012.

Visi Indonesia 2050 merupakan inisiasi kolaboratif perusahaan-perusahaan anggota IBCSD dan kalangan swasta lainnya di bawah payung Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), sebagai bentuk respon sektor bisnis terhadap tantangan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.



Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) merupakan salah satu chapter dari World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yang terdiri dari kumpulan perusahaan yang merupakan inisiatif dan dipimpin langsung oleh para CEO masing-masing perusahaan anggota, yang beroperasi di Indonesia dan memiliki komitmen dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, keseimbangan ekologi dan perkembangan sosial. IBCSD pada bulan April 2011 mendedikasikan dirinya untuk menyediakan landasan bagi dunia bisnis dalam berbagi dan mempromosikan praktek terbaik dalam mengatasi risiko bisnis selaras dengan pembangunan berkelanjutan. IBCSD juga berperan sebagai mitra bagi pemerintah dan masyarakat dengan memberikan masukan dan solusi dunia usaha bagi kebijakan publik Indonesia dalam isu terkait pembangunan keberlanjutan.

DAFTAR ISI

Daftar Isi _____	iii		
Daftar Tabel _____	iv		
Daftar Gambar _____	iv		
Daftar Grafik _____	iv		
VISI INDONESIA 2050	1		
Pembangunan Manusia	7	Energi dan Kelistrikan	37
Visi Elemen.....	7	Visi Elemen	37
Indikator Keberhasilan.....	7	Indikator Keberhasilan.....	37
Kondisi Pemungkin	9	Kondisi Pemungkin	38
Periode Turbulensi 2015 – 2020	9	Periode Turbulensi 2015 – 2020.....	39
Periode Transformasi 2020 – 2050	11	Periode Transformasi 2020 – 2050.....	41
Ekonomi	13	Pariwisata dan Keragaman Budaya	43
Visi Elemen.....	13	Visi Elemen	43
Indikator Keberhasilan.....	13	Indikator Keberhasilan.....	43
Kondisi Pemungkin	14	Kondisi Pemungkin	45
Periode Turbulensi 2015 – 2020	16	Periode Turbulensi 2015 – 2020.....	46
Periode Transformasi 2020 – 2050	17	Periode Transformasi 2020 – 2050.....	48
Kelautan	19	Transportasi dan Konektivitas	49
Visi Elemen.....	19	Visi Elemen	49
Indikator Keberhasilan.....	19	Indikator Keberhasilan.....	49
Kondisi Pemungkin	20	Kondisi Pemungkin	51
Periode Turbulensi 2015 – 2020	21	Periode Turbulensi 2015 – 2020.....	52
Periode Transformasi 2020 – 2050	23	Periode Transformasi 2020 – 2050.....	54
Pertanian	25	Infrastruktur	55
Visi Elemen.....	25	Visi Elemen	55
Indikator Keberhasilan.....	25	Indikator Keberhasilan.....	55
Kondisi Pemungkin	26	Kondisi Pemungkin	56
Periode Turbulensi 2015 – 2020	28	Periode Turbulensi 2015 – 2020.....	57
Periode Transformasi 2020 – 2050	30	Periode Transformasi 2020 – 2050.....	58
Kehutanan	31	Efisiensi Sumber Daya dan	
Visi Elemen.....	31	Pengelolaan Sampah	61
Indikator Keberhasilan.....	31	Visi Elemen	61
Kondisi Pemungkin	33	Indikator Keberhasilan.....	61
Periode Turbulensi 2015 – 2020	34	Kondisi Pemungkin	63
Periode Transformasi 2020 – 2050	35	Periode Turbulensi 2015 – 2020.....	64
		Periode Transformasi 2020 – 2050.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Human Development Index (HDI) Indonesia.....	7
Tabel 2. Persentase Tamat Pendidikan Menengah (Pendidikan Setara SM+/Sederajat)	8
Tabel 3. Proyeksi Usia Produktif dan Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia.....	11
Tabel 4. Kontribusi Sektor Kelautan dalam PDB Nasional tahun 2008.....	20
Tabel 5. Luas Penggunaan Lahan di Indonesia (2008-2012).....	26
Tabel 6. IUPHHK-RE yang Telah Dikeluarkan Pemerintah.....	36
Tabel 7. Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik per Wilayah di Indonesia 2015-2019.....	40
Tabel 8. Pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA & PLTMH) 2015-2019.....	41
Tabel 9. Kunjungan Wisatawan 2010-2014.....	43
Tabel 10. Kontribusi Tenaga kerja Sektor Pariwisata terhadap Tenaga kerja Nasional 2010-2013	45
Tabel 11. Kontribusi Sektor Transportasi (Pengangkutan) terhadap PDB Nasional 2010-2014 (Miliar Rupiah)	50
Tabel 12. Investasi dan Pembiayaan Transportasi 2015-2019	52
Tabel 13. Peran Wilayah/Pulau dalam Pembentukann PDB Nasional 1982-2013	56
Tabel 14. Alternatif Sistem Pengolahan Sampah	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Potret Kesenjangan Antar Wilayah	18
Gambar 2. Konsep Tol Laut.....	22
Gambar 3. Peta Kemiskinan Masyarakat Pesisir	23
Gambar 4. Sebaran Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dalam Destinasi Pariwisata Nasional.....	47
Gambar 5. Isu Strategis Pembangunan Infrastruktur Transportasi	49
Gambar 6. Skenario Pembangunan Infrastruktur Transportasi	53
Gambar 7. Model Kerjasama Pemerintah-Swasta	58
Gambar 8. Target Pemerataan Pembangunan Infrastruktur.....	59
Gambar 9. Keseimbangan Tiga Aspek Pembangunan Berkelanjutan	62

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Bonus Demografi.....	10
<i>Sumber: BPS dan UN Statistic, 2013.....</i>	<i>10</i>
Grafik 2. Proporsi Urban dan Rural Indonesia (1950-2050)	12
<i>Sumber: BPS dan UN Statistic</i>	<i>12</i>
Grafik 3. Rasio Gini 2003-2013.....	14
Grafik 4. Anggaran Infrastruktur 2010-2015 (Triliun Rupiah).....	15
Grafik 5. Perbandingan Rumah Tangga Pertanian Pengguna Lahan dan Petani Gurem	30
Grafik 6. Kontribusi PDB Kehutanan terhadap Total PDB dan Persentase Kontribusi PDB Kehutanan terhadap Total PDB (Atas Dasar Harga Konstan 2000 – 2013).....	32
Grafik 7. Deforestasi di Indonesia Periode Tahun 2000 – 2009 (dalam juta Ha).....	33
Grafik 8. Target Pengembangan IUPHHK-RE	36
Grafik 9. Perbandingan Penerimaan Negara Sektor ESDM dengan Tingkat Elastisitas Energi ...	37
Grafik 10. Bauran Energi Indonesia Tahun 2005 dan Target Bauran Energi Indonesia Tahun 2025	38
Grafik 11. Target Bauran Energi Sampai Dengan 2050.....	41
Grafik 12. Kontribusi Pariwisata terhadap PDB ...	44
Grafik 13. Potensi Kekuatan Pariwisata Indonesia	44
Grafik 13. Pembiayaan Infrastruktur melalui APBN (2005-2014).....	57
Grafik 14. Perbandingan Elastisitas Energi Antar Negara Periode 1998-2003	62

VISI INDONESIA 2050: KONTRIBUSI SEKTOR BISNIS BAGI INDONESIA MASA DEPAN

Visi Indonesia 2050 merupakan inisiasi kolaboratif perusahaan-perusahaan anggota IBCSD dan kalangan swasta lainnya di bawah payung Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), sebagai bentuk respon sektor bisnis terhadap tantangan Indonesia di masa depan.

Kalangan bisnis meyakini bahwa "*business as usual*" –praktik dan cara kelola biasa yang selama ini digunakan–, tidak dapat lagi menjadi pilihan utama dalam menghadapi iklim yang berubah lebih cepat dari yang pernah diperkirakan sebelumnya, penurunan drastis jasa ekosistem penting, ancaman kelangkaan pangan dan energi bagi sebagian penduduk, dan bertubinya deraan krisis keuangan yang sebagian besar dipicu terutama oleh cara pikir jangka pendek dan tata kelola yang buruk.

Upaya kolektif sektor swasta dalam pengembangan Visi Indonesia 2050 kini dilandaskan pada konsep pembangunan yang berkelanjutan. Konsep yang sesungguhnya telah lama diperkenalkan, pertama kali dalam World Conservation Strategy yang diterbitkan oleh UNEP, IUCN dan WWF pada 1980 kemudian dipopulerkan melalui laporan WCED yang berjudul *Our Common Future* yang diterbitkan pada 1987. Laporan ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Visi Indonesia 2050 diharapkan akan dapat menyediakan *platform* dan kerangka kerja bagi para pemangku kepentingan yang relevan untuk bersama-sama memastikan kesiapan pelaku usaha menghadapi tantangan perubahan masa depan, baik pada tingkat nasional maupun global dan memberikan panduan bagi perusahaan dalam berinteraksi dan berdialog dengan pilar pembangunan lain, yaitu pemerintah dan masyarakat sipil tentang bagaimana masa depan Indonesia yang berkelanjutan dapat terwujud.

Dokumen ini akan memberikan tantangan bagi perusahaan untuk memikirkan dan mendefinisikan kembali produk mereka, jasa dan strategi, menemukan peluang baru dengan menempatkan keberlanjutan sebagai pusat inovasi, mengkomunikasikannya dan memotivasi karyawan dan anggota dewan direksi maupun komisaris, dan mendorong pengambilan peran kepemimpinan dalam dimensi pembangunan yang lebih luas dan strategis.

Pada saat yang sama, juga diharapkan bahwa dokumen ini akan mampu memberikan ruang pertimbangan bagi pemerintah dalam pengembangan kebijakan, peraturan maupun insentif yang diperlukan untuk mendorong pasar bergerak menuju keberlanjutan, dan membuat perbedaan signifikan atas masa depan Indonesia, menjadikan Indonesia lebih baik dalam segala aspeknya, bagi seluruh komponen masyarakat, bagi generasi kini dan generasi nanti.



Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

(Our Common Future, WCED, 1987)

Proses perumusan Visi Indonesia 2050 dilakukan dalam dua fase, yaitu fase pertama adalah fase penetapan bersama visi 2050 dan identifikasi bagaimana rute pencapaian visi tersebut akan ditempuh. Sedangkan fase kedua adalah penerjemahan visi dan peta jalan 2050 dalam bentuk-bentuk rencana aksi 2020 dan 2030 – 2050.

Pada fase pertama, pemetaan tren dan batasan kondisi Indonesia tahun 2050 jika praktik kelola tetap dilakukan dengan cara-cara biasa (*business as usual*) telah dilakukan dan telah disajikan pada **Dokumen 1: Tren Indonesia 2050**. Peta kecenderungan kondisi Indonesia pada tahun 2050 memberikan gambaran umum, seperti apa kondisi Indonesia masa depan; menyajikan kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2050, situasi populasi penduduk dan status pembangunan manusia, serta keterbatasan energi dan daya dukung lingkungan pada periode yang sama, yang kesemuanya didasarkan pada asumsi praktik-praktik kelola biasa. Dokumen pertama telah memberikan prediksi dan harapan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang luar biasa pada periode tersebut, sekaligus menyisakan tantangan yang sama sekali tidaklah sederhana.

Tahapan kedua pada fase pertama diawali dengan penyepakatan visi bersama korporasi bagi kondisi ideal Indonesia 2050 dan kemudian diikuti dengan upaya menurunkan visi bersama tersebut menjadi visi masing-masing area fokus/elemen. Terdapat 10 elemen yang akan menjadi kunci peta jalan menuju visi Indonesia 2050, seharusnya mampu memberikan perspektif baru yang lebih terarah dalam menuju Indonesia yang berkelanjutan pada dekade-dekade mendatang. 10 elemen tersebut adalah: Pembangunan Manusia, Ekonomi, Kelautan, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Kelistrikan, Pariwisata dan Keragaman Budaya, Transportasi dan Konektivitas, Efisiensi Sumber Daya dan Pengelolaan Sampah, dan Infrastruktur.



Pernyataan visi per elemen tersebut akan dilanjutkan dengan tahapan identifikasi indikator keberhasilan pencapaian visi per masing-masing elemen yang akan memandu proses pemetaan atas faktor pemungkin dan strategi implementasi jangka pendek 2020 dan jangka menengah 2030 – 2050. Keseluruhannya secara utuh merupakan peta jalan sektor korporasi Indonesia menuju Visi Indonesia 2050.

Dokumen 2: Visi dan Peta Jalan Indonesia 2050 akan menanggapi beberapa pertanyaan kunci terkait visi masa depan Indonesia: *Melalui model dan skema pembangunan berkelanjutan, seperti apa kondisi Indonesia yang kita harapkan bersama di masa depan? Bagaimana kita bisa mewujudkannya? Bagaimana kita sampai di sana? Bentuk tata kelola seperti apa yang menjadi pemungkin perubahan tersebut terjadi? Perubahan pada kecepatan dan skala berapa? Apa kontribusi yang dapat diperankan sektor bisnis dalam memastikan pencapaian lebih cepat?*

Dalam penyusunan dokumen kedua ini, proyeksi-proyeksi yang bersifat kuantitatif digunakan sebagai pelengkap bagi metode *'conjecture'* atau penerawangan secara kualitatif, sebuah metode yang sama yang digunakan oleh Prof Dr Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dalam penyusunan bukunya yang berjudul *Menerawang Indonesia pada Dasawarsa Ketiga Abad ke-21 (2012)*. Proyeksi perkembangan pembangunan Indonesia masa depan telah dinyatakan pada dokumen pertama *Tren Indonesia 2050* melalui tiga aspek analisa utama yaitu aspek populasi, ekonomi dan lingkungan, yang didasarkan pada pengenalan data masa lalu dan informasi masa kini dari segala variabel dan parameter yang perilakunya akan berkaitan dan mempengaruhi berbagai perkembangan aspek pembangunan di masa depan.

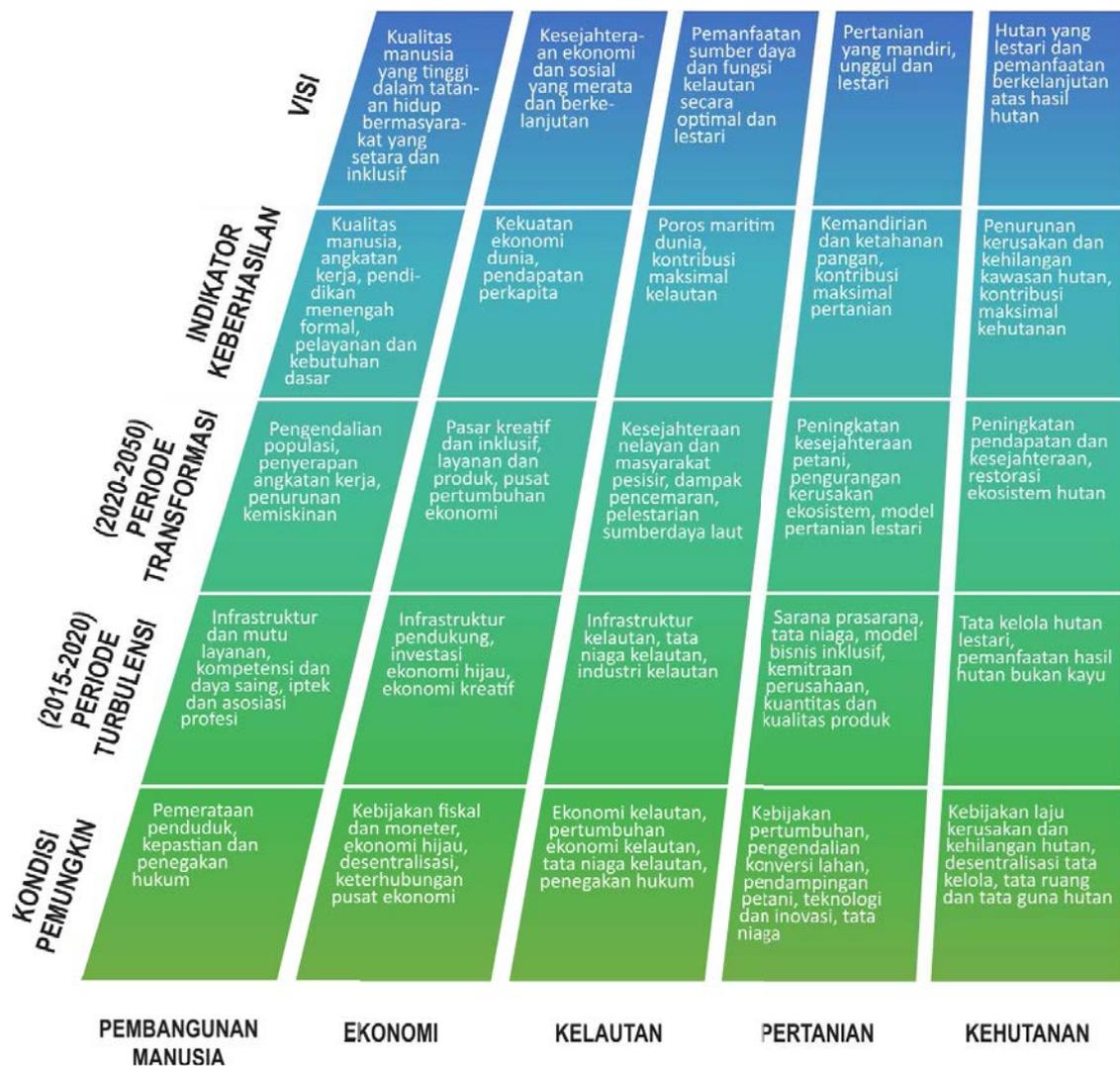
Sedangkan pada dokumen *Visi dan Peta Jalan Indonesia 2050*, penyusunan visi lebih didasarkan pada pilihan akan probabilitas dari keberhasilan pembangunan yang akan dapat dicapai dalam kerangka kerja model pembangunan berkelanjutan. Baru kemudian pilihan atas probabilitas tersebut diturunkan dalam rincian perencanaan strategi sebagai peta penunjuk jalan pencapaian visi dalam jangka panjang.

Metode ini diharapkan akan dapat mengawali terbangunnya diskusi, pembahasan dan penelaahan lanjutan yang kritis, memicu pengambilan kebijakan dan keputusan strategis, dan mendorong terjadinya perubahan mendasar atas praktik-praktik kelola biasa yang selama ini terjadi.

VISI INDONESIA 2050

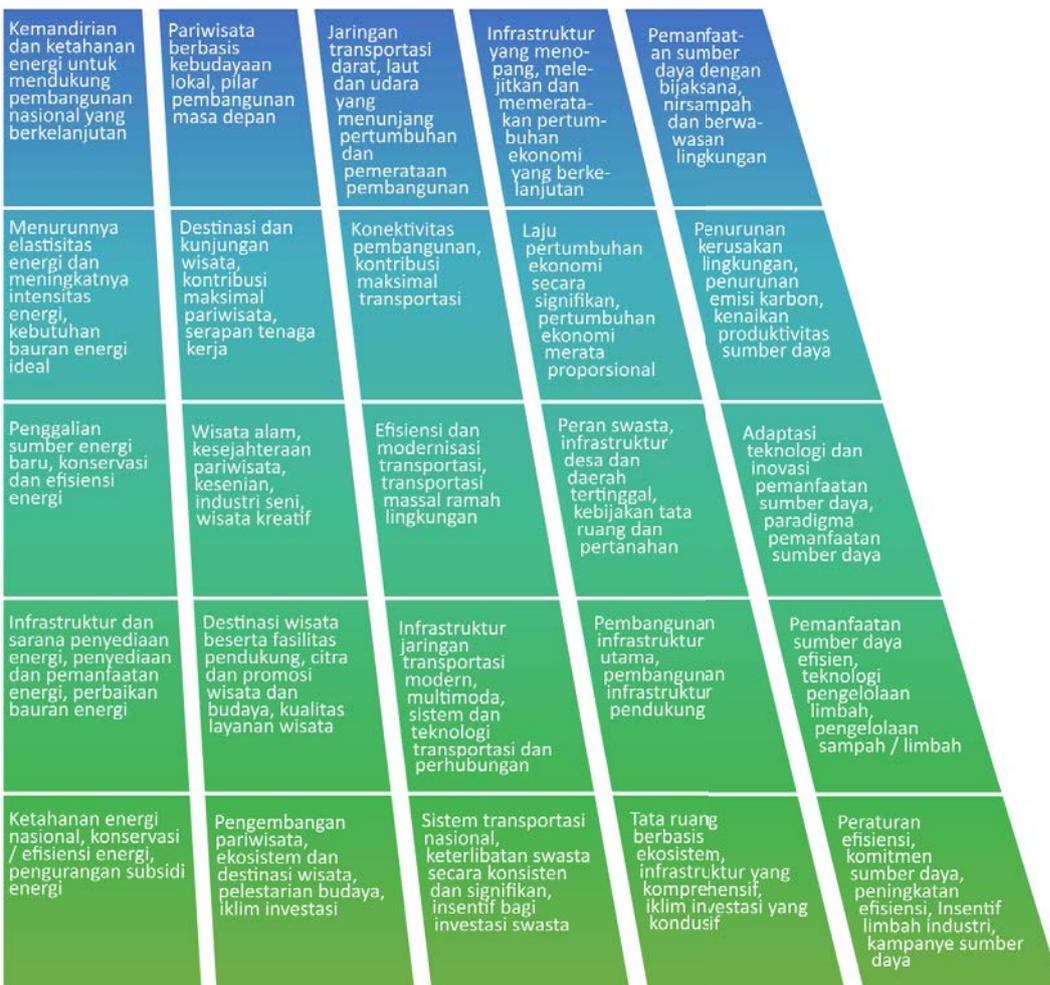
Visi bersama bagi Indonesia 2050 yang telah mempertimbangkan secara seimbang aspek pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan pengelolaan lingkungan yang lestari dinyatakan sebagai berikut:

Indonesia 2050, kekuatan ekonomi dunia yang ditopang pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam dan pembangunan kualitas manusia yang setinggi-tingginya



Visi Indonesia 2050 akan berpilarkan visi per masing-masing elemen, menjadi kekuatan arah yang saling mendukung dan tidak terpisahkan satu sama lain, yang dinyatakan sebagai berikut:

Pembangunan Manusia	Kualitas manusia yang tinggi dalam tatanan hidup bermasyarakat yang setara dan inklusif
Ekonomi	Kesejahteraan ekonomi dan sosial yang merata dan berkelanjutan
Kelautan	Pemanfaatan sumber daya dan fungsi kelautan secara optimal dan lestari
Pertanian	Pertanian yang mandiri, unggul dan lestari
Kehutanan	Hutan yang lestari dan pemanfaatan berkelanjutan atas hasil hutan
Energi dan Kelistrikan	Kemandirian dan ketahanan energi untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan
Pariwisata dan Keragaman Budaya	Pariwisata berbasis kebudayaan lokal, pilar pembangunan masa depan
Transportasi dan Konektivitas	Jaringan transportasi darat, laut dan udara yang menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan
Infrastruktur	Infrastruktur yang menopang, melejitkan dan pemeratakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Efisiensi Sumber Daya dan Pengelolaan Sampah	Pemanfaatan sumber daya dengan bijaksana, nirsampah dan berwawasan lingkungan



ENERGI & KELISTRIKAN

PARIWISATA & KERAGAMAN BUDAYA

TRANSPORTASI & KONEKTIVITAS

INFRASTRUKTUR

EFISIENSI SUMBER DAYA & PENGELOLAAN SAMPAH

VISI ELEMEN

Kualitas manusia yang tinggi dalam tatanan hidup bermasyarakat yang setara dan inklusif

Pembangunan manusia Indonesia menjadi faktor penting dan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Tantangan global menuntut prasyarat terwujudnya kualitas manusia yang tinggi dan mumpuni, memiliki produktifitas serta berdaya saing.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.

Pembangunan eksklusif kini hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian, sehingga terkadang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan angka rasio gini yang semakin melebar. Dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa dan prediksi 320 juta jiwa pada tahun 2050, banyak kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan karena jenis kelamin, etnis, usia, orientasi seksual, kecacatan atau kemiskinan.

Diyakini bahwa pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif. Strategi utama pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai.



pembangunan manusia menjadi kunci keberhasilan pembangunan, menuntut prasyarat terwujudnya kualitas manusia yang tinggi

INDIKATOR KEBERHASILAN

Kualitas manusia Indonesia yang tinggi

Dalam menjawab tantangan global, kualitas manusia Indonesia yang tinggi dan berdaya saing merupakan prasyarat yang harus dicapai. Salah satu ukuran yang dapat dilihat untuk mengukur kualitas pembangunan manusia yaitu melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang dilansir oleh UNDP dalam Indeks Pembangunan Manusia/*Human Development Index – HDI* tahun 2014, IPM Indonesia pada tahun 2013 berada pada angka 0,684. Angka IPM ini menempatkan Indonesia pada urutan 108 dari 187 negara. Jika dibandingkan dengan Negara ASEAN, Indonesia menempati urutan ke-5 dibawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand.

Tabel 1. Human Development Index (HDI) Indonesia

Tahun	HDI	Ranking
2013	0,684	108
2012	0,681	108
2011	0,678	110
2010	0,671	110
2008	0,654	104
2005	0,640	103
2000	0,609	94
1990	0,528	98
1980	0,471	83

Sumber: UNDP, *Human Development Index Trends 1980 – 2013, 2014*

Human Development Index (HDI)/Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia, yang digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

— *Human Development Report (HDR), UNDP 2014*

Tabel 2. Persentase Tamat Pendidikan Menengah (Pendidikan Setara SM+/Sederajat)

Tahun	%
2013	31,41
2012	30,91
2011	29,50
2010	29,69
2009	28,49
2008	27,46
2007	26,73
2006	25,78
2005	24,37
2004	23,72

Sumber: Halaman web resmi BPS, Menu Indikator Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk 15 Tahun ke Atas

Peningkatan kualitas dan kuantitas terhadap akses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang dapat menjangkau masyarakat di seluruh penjuru nusantara merupakan prasyarat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan dan menciptakan kualitas manusia yang tinggi di Indonesia.

Terserapnya angkatan kerja secara maksimal

Terserapnya angkatan kerja secara maksimal terutama pada usia produktif merupakan indikator keberhasilan suatu bangsa membangun sumber daya manusianya.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada tahun 2013 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) hanya mencapai 66,90% dari total jumlah angkatan kerja nasional.

Terserapnya angkatan kerja secara maksimal dimungkinkan dapat dicapai jika semua pemangku kepentingan terutama pemerintah dan swasta dapat bersinergi. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat terkait dengan ketenagakerjaan dengan memperluas kesempatan kerja dan lapangan kerja serta meningkatkan mutu tenaga kerja. Sementara swasta dapat berkontribusi melalui investasi pada pengembangan industri yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar misalnya industri yang padat karya.

Penduduk dengan minimal tingkat pendidikan menengah formal

Pertahun 2013 Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menengah formal (SM+/Sederajat) yang ditamatkan oleh penduduk pada usia 15 tahun ke atas mencapai 31,41%. Masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan penduduk dalam menamatkan pendidikan menengah formal disebabkan oleh rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan murah dan berkualitas.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong perbaikan tingkat partisipasi sekolah, penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah dapat memperkuat program tersebut dengan mendorong penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai dan merata. Sektor swasta dapat berperan dalam konteks ini dengan memberikan bantuan beasiswa bagi anak didik yang kurang mampu.

Meratanya akses terhadap pelayanan dasar dan terpenuhinya kebutuhan dasar

Untuk mewujudkan pembangunan manusia Indonesia, akses seluas-luasnya terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat harus diupayakan terdesentralisasi dan dibangun secara merata di seluruh penjuru wilayah Indonesia.

KONDISI PEMUNGKIN

Kebijakan dan program jangka panjang untuk pengendalian populasi penduduk dan pemerataan penyebaran penduduk

Pembangunan manusia Indonesia harus ditopang dengan kebijakan pengendalian populasi penduduk yang memadai, yang bertujuan untuk memelihara keseimbangan antara pertumbuhan dan penyebaran penduduk.

Selain pengendalian pertumbuhan penduduk, pemerataan sebaran penduduk harus dilakukan agar tidak terpusat di sentra-sentra pembangunan ekonomi tertentu. Angka urbanisasi harus dapat ditekan. Kebijakan populasi penduduk harus dilaksanakan seiring dengan kebijakan pemerataan pembangunan ekonomi dan desentralisasi.

Kepastian hukum dan perbaikan penegakan hukum

Dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia, jaminan kepastian hukum dan perbaikan penegakan hukum harus menjadi prioritas utama, agar jaminan atas hak-hak warga negara dalam mengakses kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan baik.

Seiring sejalan dengan langkah perbaikan penegakan hukum, sektor usaha juga wajib mengembangkan tanggung jawab dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap aktivitas usaha yang dijalankan, melindungi dan meningkatkan kapasitas masyarakat, serta menghindari, mengurangi dan mencegah dampak negatif aktivitas operasional bisnis.

Prinsip-prinsip tanggung jawab bisnis terhadap HAM:

1. Negara wajib melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk bisnis,
2. Tanggung jawab bisnis menghormati HAM, tidak melanggar HAM yang diakui internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional bisnis, dan
3. Kebutuhan memperluas akses bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial.

—UN Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011

PERIODE TURBULENSI 2015 – 2020

Perbaikan infrastruktur dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan

Pendidikan dan kesehatan menjadi landasan utama peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong pemenuhan atau perbaikan infrastruktur layanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah dan penyedia layanan swasta perlu segera memperbaiki infrastruktur, sistem dan mutu layanan yang diberikan.

Dalam bidang pendidikan, perlu peningkatan partisipasi untuk memastikan setiap anak bangsa mendapatkan hak pendidikan yang layak. Sementara dalam bidang kesehatan, perlu upaya meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan pengembangan jaring pengaman sosial dan pemerataan layanan kesehatan.

Peningkatan kompetensi dan daya saing angkatan kerja

Salah satu tantangan dalam menyongsong era globalisasi dalam persaingan pasar bebas adalah tingkat kompetensi dan daya saing angkatan kerja Indonesia. Pemerintah telah memulai upaya pengembangan pendidikan berbasis keterampilan, seperti memperbanyak sekolah kejuruan pada tingkat sekolah menengah, mendorong berkembangnya perguruan tinggi lokal, selain juga dengan memperkuat balai-balai pelatihan di masing-masing kabupaten/kota.

Korporasi juga dapat berperan melalui upaya peningkatan kompetensi dengan mengembangkan pendidikan dan keterampilan yang berorientasi peluang kerja di masa depan, membuka sarana pelatihan dan magang, meningkatkan kesempatan kerja serta mempromosikan kondisi kerja yang lebih baik dan layak dalam perusahaan.

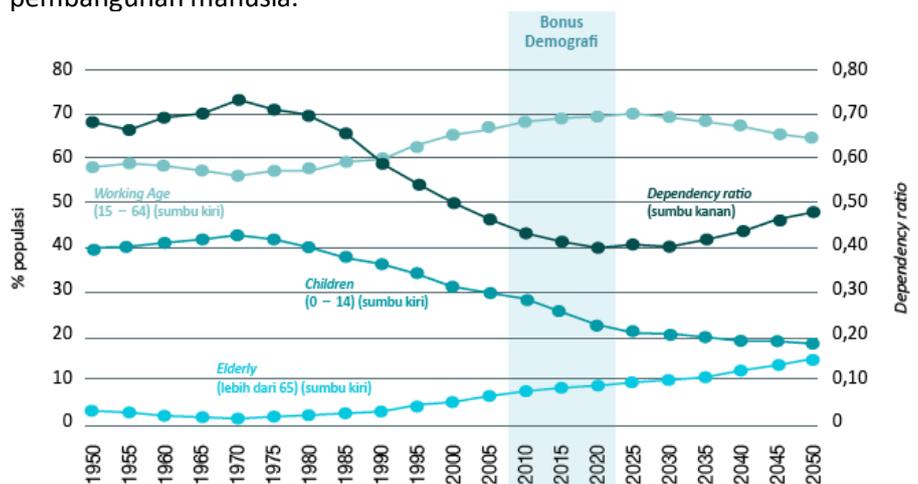
Perusahaan juga dapat mengembangkan pendekatan bisnis inklusif yang mengajak masyarakat lokal sebagai bagian dari rantai bisnis inti perusahaan sebagai pemasok, distributor, pengecer, pekerja/karyawan dan pelanggan.

Pengembangan IPTEK dan pengembangan asosiasi profesi

Peningkatan kualitas manusia Indonesia tidak luput dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berikut perangkat penunjangnya. Dukungan kebijakan dari pemerintah dibutuhkan untuk mengoptimalkan setiap sumber daya IPTEK yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga dapat berkembang dan maju selaras dengan kebutuhan zaman.

Korporasi dapat berkontribusi melalui pemberian dukungan bagi upaya riset dan kajian, termasuk mendukung kelembagaan sertifikasi dan asosiasi profesi. Sehingga lembaga sertifikasi dan asosiasi dapat menjadi terobosan dari dunia korporasi untuk memberikan dukungan bagi terlaksananya pembangunan manusia.

Korporasi menjadi katalisator dalam upaya penanggulangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi dengan mengembangkan pendidikan dan keterampilan yang berorientasi masa depan, membuka sarana pelatihan dan pemagangan, meningkatkan kesempatan kerja serta mempromosikan kondisi kerja yang lebih baik dan layak dalam perusahaan.



Grafik 1. Bonus Demografi

Sumber: BPS dan UN Statistic, 2013

PERIODE TRANSFORMASI 2020 – 2050

Pengendalian populasi penduduk

Salah satu faktor penting untuk mendorong tercapainya tingkat kualitas manusia yang tinggi yaitu dengan upaya pengendalian tingkat populasi penduduk. Dengan tingkat populasi yang terkendali akan dapat membuka peluang bagi penyediaan layanan dasar yang lebih berkualitas.

Pemerintah sudah seharusnya kembali mendorong dan memperkuat program Keluarga Berencana (KB) yang pernah menjadi program unggulan pada periode-periode sebelumnya sebagai strategi jangka panjang pengendalian populasi penduduk.

Penyerapan maksimal angkatan kerja

Pada periode tahun 2030, Indonesia diprediksi mengalami bonus demografi, usia 15 sampai 64 tahun mengalami lompatan tertinggi pada sepanjang periode sejarah pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai 68,1%. Periode tercapainya bonus demografi merupakan kurun waktu di mana angkatan kerja produktif tersedia secara maksimal, yang seharusnya dapat dikapitalisasi menjadi modal pengungkit perekonomian Indonesia.

Upaya peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan penyerapan angkatan kerja, terutama pada tenaga kerja produktif harus menjadi prioritas utama pembangunan nasional, dengan terserapnya secara maksimal usia produktif pada dunia kerja akan berdampak pada turunnya angka ketergantungan.

Tahun	Komposisi Umur (dalam %)			Dependency Ratio (dalam %)
	0-14 tahun	15-64 tahun	> 65 tahun	
2015	27,3	67,3	5,4	48,6
2020	26,1	67,7	6,2	47,7
2025	24,6	67,9	7,5	47,2
2030	22,9	68,1	9	46,9
2035	21,5	67,9	10,6	47,3

Tabel 3. Proyeksi Usia Produktif dan Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia

Sumber: *Indonesia Population Projection 2010 – 2035, BPS–Bappenas–UNFPA, 2013*

Penurunan tingkat kemiskinan serendah-rendahnya

Pembangunan manusia Indonesia merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari upaya pengentasan kemiskinan, keduanya seperti mata simpul dalam lingkaran yang saling bertaut. Peningkatan kualitas manusia Indonesia akan membantu bangsa ini beranjak dari garis kemiskinan, namun kemiskinan jugalah yang menjadi hambatan utama peningkatan kualitas manusia Indonesia saat ini.

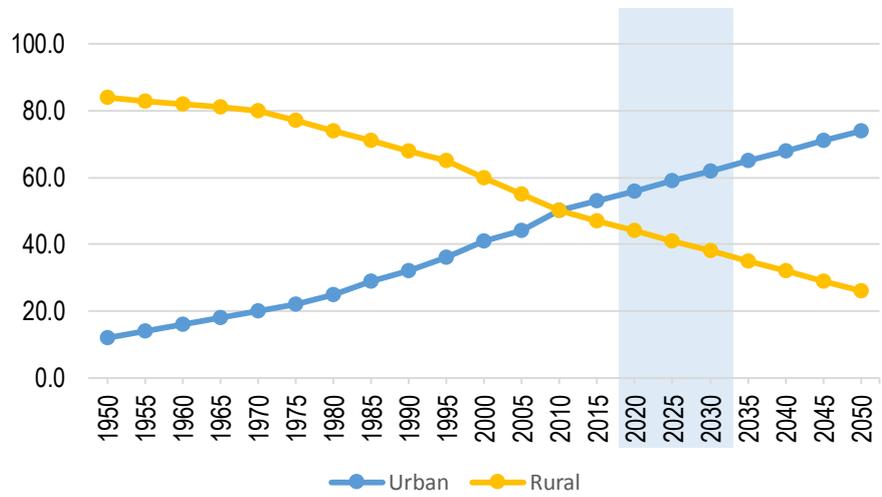
Pemerintah dan swasta harus meyakini bahwa pembangunan inklusif dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Pembangunan inklusif hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan

Angka kemiskinan di Indonesia mencapai 29,13 juta jiwa atau 11,96% dari total jumlah penduduk Indonesia. Penurunan angka kemiskinan dalam RPJP 2005–2025, ditargetkan penduduk miskin di tahun 2025 sebesar 14,5 juta jiwa atau 5,3% dari total jumlah penduduk Indonesia.

—BPS, 2102

peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluasnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel.

Grafik 2. Proporsi Urban dan Rural Indonesia (1950-2050)
 Sumber: BPS dan UN Statistic



VISI ELEMEN

Kesejahteraan ekonomi dan sosial yang merata dan berkelanjutan

Perekonomian sebuah negara dikatakan tumbuh dan maju apabila tingkat kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat tinggi, merata dan berkelanjutan. Hal tersebut akan didukung dengan tingginya tingkat pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat serta tingkat ketergantungan usia non produktif berada pada titik terendah.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki segala prasyarat menjadi salah satu negara maju. Jumlah penduduk yang besar sebagai modal utama, ditunjang dengan prediksi bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi pada periode 2030. Dari sisi ketersediaan sumber daya alam, Indonesia tergolong negara yang kaya dengan sumber daya alam fosil maupun non-fosil.

Kesejahteraan ekonomi dan sosial akan dapat dicapai dengan mendorong pemerataan pembangunan pada daerah-daerah. Melalui kebijakan otonomi daerah pelaksanaan desentralisasi kekuasaan dan fiskal dapat menjadi solusi yang tepat untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial, sehingga dapat meminimalkan tingkat kesenjangan antar daerah.



tingkat perekonomian sebuah negara dikatakan tumbuh dan maju apabila tingkat kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat tinggi, merata dan berkelanjutan

INDIKATOR KEBERHASILAN

Menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia

PricewaterhouseCoopers dalam kajiannya mencatat prediksi ekonomi Indonesia pada tahun 2030 yang menunjukkan bahwa PDB Indonesia telah tumbuh pesat dan berada pada urutan ke-11 dunia, bahkan di tahun 2050 akan melesat lagi menjadi urutan ke-8 dunia, di mana peringkat Indonesia hanya akan berada di bawah Tiongkok, AS, India, Brazil, Jepang, Rusia dan Meksiko serta melampaui negara-negara besar seperti Jerman, Prancis dan Inggris.

Optimisme tersebut dikuatkan kembali oleh hasil kajian McKinsey Global Institute yang memperkirakan Indonesia sudah akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke-7 dunia bahkan pada tahun 2030.

Data yang dihasilkan oleh kajian di atas merupakan salah satu indikator penting yang harus dibuktikan sebagai kunci keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Formulasi kebijakan yang tepat dan dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi yang memadai akan menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia sebagaimana yang telah diprediksi di atas.

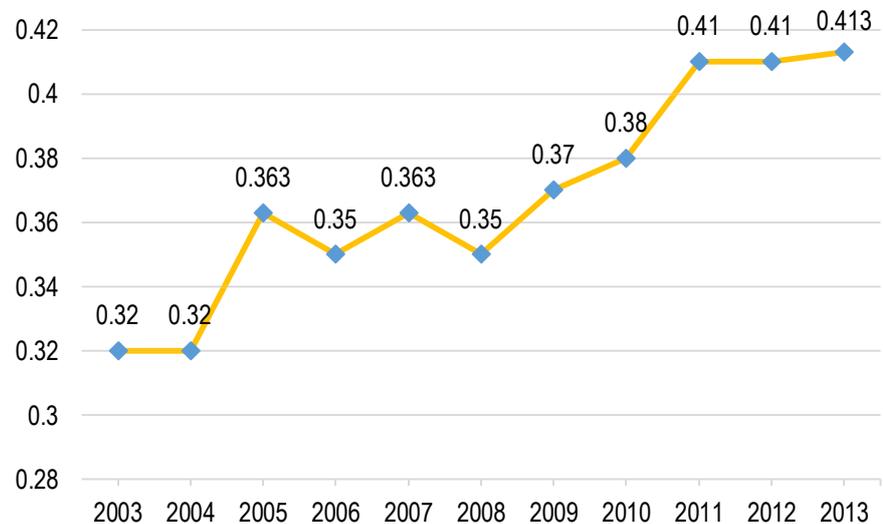
2050, Indonesia diperhitungkan menjadi 8 besar kekuatan ekonomi dunia di bawah Tiongkok, AS, India, Brazil, Jepang, Rusia dan Meksiko serta melampaui negara-negara besar seperti Jerman, Prancis dan Inggris

Rasio Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan) hingga satu (ketimpangan)

Pendapatan per kapita yang tinggi dan merata

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2014-2019) Indonesia telah menargetkan perbaikan indeks rasio ketimpangan pendapatan kelompok masyarakat (Rasio Gini) dari yang sebelumnya 0,42 menjadi 0,36 dalam kurun waktu lima tahun. Penurunan disparitas tingkat pendapatan per kapita harus didorong dengan upaya meningkatkan belanja negara ke daerah dengan menambahkan belanja transfer pemerintah pusat ke daerah.

Hal lain yang harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja untuk beralih ke industri dan jasa yang lebih padat modal. Kesenjangan pendapatan salah satunya disebabkan besarnya segmen angkatan kerja yang masih bekerja di sektor yang tidak padat modal.



Grafik 3. Rasio Gini 2003-2013

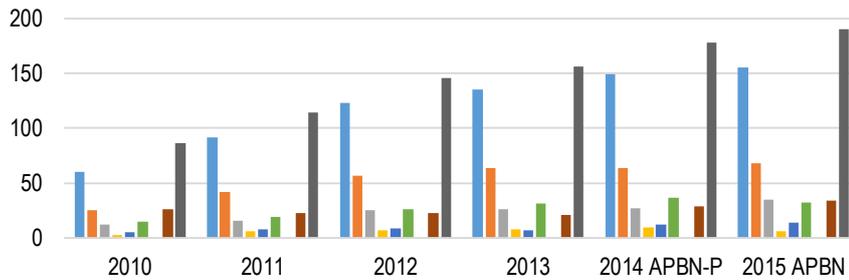
Sumber: Halaman Web Resmi BPS, Menu Gini Ratio Menurut Ptovisi

KONDISI PEMUNGKIN

Kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi

Untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, Indonesia telah mengarahkan kebijakan fiskal terhadap belanja negara dalam postur APBN pada sektor padat karya. Belanja terhadap peningkatan infrastruktur yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi harus terus ditingkatkan. Pemerintah menargetkan pada sepanjang periode 2015 – 2025 akan membangun jalan tol di seluruh area-area pertumbuhan ekonomi sepanjang 3.733 Km.

Kebijakan lain yang dibutuhkan dalam mendorong tingkat pertumbuhan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi yaitu mendorong pembangunan ekonomi dari daerah pinggiran. Penambahan secara sistematis dana transfer daerah dan dana pembangunan desa diharapkan dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.



K/L	59.9	91.2	122.6	134.9	149.4	155.4
Kemen PU	24.9	41.8	56.5	63.5	63.8	68.1
Kemenhub	12.4	16	25.3	26	27.3	35
Kemen ESDM	3	6.2	6.7	7.7	9.3	5.9
Kemendikbud	5.1	8.2	8.4	6.7	12	14
K/L Lainnya	14.5	19	25.8	31.1	37	32.4
Non K/L	26.1	23	22.8	21	28.5	34.3
Total	86	114.2	145.4	155.9	177.9	189.7

Grafik 4. Anggaran Infrastruktur 2010-2015 (Triliun Rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah)

Dukungan kebijakan bagi investasi ekonomi hijau

Tantangan yang dihadapi di era sekarang ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat sembari menjaga keberlangsungan fungsi-fungsi jasa ekosistem. Dalam menjawab tantangan tersebut, maka dibutuhkan kerangka kebijakan dan peraturan pemerintah yang mendorong investasi swasta pada sektor ekonomi hijau, yang berbasis pada pemanfaatan berkelanjutan jasa-jasa ekosistem, berorientasi pada pengurangan kemiskinan, meningkatkan lapangan pekerjaan, kesetaraan sosial dan investasi yang meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan energi serta mengalihkan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan dan rendah emisi.

Desentralisasi dan subsidiaritas pembangunan ekonomi

Desentralisasi dan kewenangan subsidiaritas pemerintah daerah sampai pada tingkat desa menjadi prasyarat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah secara mandiri. Peningkatan anggaran belanja daerah dan belanja infrastruktur diperlukan untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi daerah terutama wilayah pinggiran dan terpencil. Desentralisasi pembangunan diharapkan dapat mengendalikan laju urbanisasi, mendorong pemerataan populasi karena pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah akan menjadi daya tarik masyarakat.

Keterhubungan antar pusat pertumbuhan ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional harus dibangun di atas konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini hanya dapat terwujud jika infrastruktur penunjang utama terbangun secara merata di dan antar setiap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi seperti jalan, pelabuhan dan bandar udara sebagai sarana untuk mendukung konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi harus terus menjadi prioritas pembangunan.

Ekonomi hijau adalah salah satu upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan.

— UNEP, *Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*, 2011

Konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan dengan mendorong terbangunnya infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi secara merata

PERIODE TURBULENSI 2015 – 2020

Penguatan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi

Sejak 10 tahun belakangan, pemerintah telah berupaya melakukan penguatan infrastruktur pendukung ekonomi di berbagai wilayah pusat pertumbuhan pembangunan. Pengembangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dilakukan dengan memberikan prioritas pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan SDM dan Iptek. Prioritas pembangunan tersebut diteruskan kemudian oleh pemerintah baru dengan beberapa modifikasi, antara lain dengan titik tekan pada rencana pembangunan sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.

Pemberian insentif bagi investasi ekonomi hijau

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dengan paradigma hijau (*green economy*) selaras dengan target pengurangan emisi karbon dari tahun ke tahun. Dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi hijau, pemerintah telah memberikan dukungan insentif perpajakan dan kepabeanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan dan meliputi beberapa fasilitas, yaitu pengurangan pajak penghasilan, pembebasan pajak pertambahan nilai dan bea masuk atas impor barang.

Pemberian insentif merupakan satu langkah konkret menjawab kebutuhan dunia usaha untuk berinvestasi dalam pengembangan ekonomi hijau. Insentif tersebut akan dapat mendorong berbagai inovasi dengan paradigma hijau terutama pada industri tenaga panas bumi, industri pemurnian dan pengolahan gas alam, industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian (*fragrance*), industri lampu tabung gas (led), pembangkit tenaga listrik, pengadaan gas alam dan buatan, penampungan penjernihan dan penampungan air bersih, angkutan perkotaan yang ramah lingkungan, kawasan pariwisata (*ecotourism*) dan pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya.

Pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi skala kecil dan menengah, serta ekonomi pedesaan

Ekonomi berbasis kreativitas semakin berkembang di Indonesia. Dukungan pemerintah terhadap ekonomi kreatif terus meningkat ditandai dengan dibentuknya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Badan Ekonomi Kreatif (BEK). Selain pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan pada sektor ekonomi skala kecil dan menengah serta ekonomi pedesaan juga menjadi perhatian pemerintah melalui kebijakan penguatan edukasi keuangan, meningkatkan akses keuangan yang didukung penguatan infrastruktur sistem pembayaran, pemanfaatan teknologi, informasi dan pengembangan jaringan ekonomi lokal. Sementara pada tingkat ekonomi pedesaan, pemerintah mendukung pembentukan dan pengelolaan BUM Desa.

Disadari sepenuhnya, dalam pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi skala kecil dan menengah, serta ekonomi pedesaan dibutuhkan keberpihakan semua pihak tidak hanya pemerintah melainkan juga

Dukungan insentif meliputi 4 jenis fasilitas:

1. Pengurangan penghasilan netto 30% dari jumlah penanaman modal.
2. Pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor barang kena pajak.
3. Pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan.
4. Pengguna energi terbarukan berhak atas fasilitas pajak pemerintah.

—Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.011/2010

Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi.

—*Ekonomi Kreatif: Rencana Aksi Jangka Menengah 2015-2019, Kememparekraf RI, 2014*

keterlibatan korporasi. Korporasi dapat berkontribusi melalui membuka dan mendekatkan akses keuangan, membuka akses pasar yang seluas-luasnya dan serta memberikan edukasi bagi pelaku usaha tersebut.

PERIODE TRANSFORMASI 2020 – 2050

Penguatan pasar kreatif dan inklusif

Ekonomi kreatif menciptakan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan, termasuk bentuk-bentuk warisan budaya dan pemanfaatan teknologi. Ekonomi kreatif merupakan sumber daya baru Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan sumber daya manusia yang inovatif dan produktif dapat ditransformasikan untuk ikut berpartisipasi dalam sektor kreatif.

Untuk mencapai penguatan pasar kreatif dapat dilakukan dengan cara pengembangan sumber daya dan teknologi di industri kreatif, peningkatan akses pembiayaan, peningkatan akses pasar, penguatan institusi industri kreatif. Pemerintah, swasta dan masyarakat dapat mengambil peranan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Peninjauan ulang secara frekuentif tentang definisi jenis layanan dan produk sesuai tuntutan pasar baru

Perkembangan ekonomi global memberikan tantangan dan tuntutan pasar baru bagi perusahaan untuk memikirkan dan mendefinisikan kembali produk, jasa dan strategi, menemukan peluang baru dengan menempatkan keberlanjutan sebagai pusat inovasi. Antara lain dapat diwujudkan dengan meninjau ulang kebijakan ekspor sumber daya alam dari bahan mentah, dan merubahnya menjadi barang jadi, seperti pendirian smelter di industri ekstraktif.

Tuntutan pasar baru mengarah pada paradigma pasar berkelanjutan mengharuskan pelaku industri menciptakan produk jasa dan layanan menggunakan standar-standar keberlanjutan, membuat produk sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga dapat mendatangkan laba, tetapi pada saat yang sama tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.

Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi harus diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah tumbuh maupun yang baru akan tumbuh. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional di mana setiap wilayah didorong untuk mengembangkan sektor/produk yang menjadi keunggulannya.

Pengembangan pusat pertumbuhan disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi aktivitas kegiatan ekonomi berikut infrastruktur pendukungnya. Pembangunan kawasan perbatasan perlu didorong di berbagai bidang, terutama peningkatan pada bidang ekonomi, sosial dan keamanan. Kawasan perbatasan perlu ditempatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegratif.

Inklusi keuangan merupakan gerakan yang berupaya membuka akses layanan perbankan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya yang sampai saat ini belum memanfaatkan jasa layanan perbankan, memiliki tujuan menghilangkan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan.

— *World Bank, European Commission, 2008*

Ekonomi global memberikan tantangan dan tuntutan pasar baru bagi perusahaan untuk memikirkan dan mendefinisikan kembali produk, jasa dan strategi, menemukan peluang baru dengan menempatkan keberlanjutan sebagai pusat inovasi.



Wilayah Sumatera	
Share PDRB terhadap 33 provinsi	23,77%
Pertumbuhan ekonomi	8,21%
2PDRB/kapita (juta Rp)	30,53
Tingkat kemiskinan	12,07%
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	6.117,20
Tingkat pengangguran	5,66%

Wilayah Kalimantan	
Share PDRB terhadap 33 provinsi	9,30%
Pertumbuhan ekonomi	4,83%
2PDRB/kapita (juta Rp)	43,70
Tingkat kemiskinan	6,69%
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	932,90
Tingkat pengangguran	5,30%

Wilayah Sulawesi	
Share PDRB terhadap 33 provinsi	4,74%
Pertumbuhan ekonomi	8,67%
2PDRB/kapita (juta Rp)	17,86
Tingkat kemiskinan	13,99%
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	2.045,60
Tingkat pengangguran	5,23%

Gambar 1. Potret Kesenjangan Antar Wilayah

Sumber: Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, 2014

Wilayah Jawa-Bali	
Share PDRB terhadap 33 provinsi	58,77%
Pertumbuhan ekonomi	6,58%
2PDRB/kapita (juta Rp)	27,61
Tingkat kemiskinan	11,36%
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	15.983,6
Tingkat pengangguran	6,65%

Wilayah Nusa Tenggara	
Share PDRB terhadap 33 provinsi	1,26%
Pertumbuhan ekonomi	1,54%
2PDRB/kapita (juta Rp)	8,97
Tingkat kemiskinan	19,79%
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	828,30
Tingkat pengangguran	4,06%

Wilayah Maluku	
Share PDRB terhadap 33 provinsi	0,27%
Pertumbuhan ekonomi	7,33%
2PDRB/kapita (juta Rp)	6,80
Tingkat kemiskinan	16,42%
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	427,20
Tingkat pengangguran	6,37%

Wilayah Papua	
Share PDRB terhadap 33 provinsi	1,79%
Pertumbuhan ekonomi	6,38%
2PDRB/kapita (juta Rp)	30,43
Tingkat kemiskinan	30,50%
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	1.199,60
Tingkat pengangguran	3,97%

VISI ELEMEN

Pemanfaatan sumber daya dan fungsi kelautan secara optimal dan lestari

Dua pertiga wilayah Indonesia adalah wilayah laut dan dengan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki sektor kelautan Indonesia, pemanfaatan sumber daya laut secara optimal dan berkelanjutan harus menjadi sasaran pembangunan nasional.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan fungsi laut harus dilaksanakan secara holistik dengan mensinergikan semua potensi yang terkandung di laut baik dari migas maupun nonmigas secara berkelanjutan dan lestari.

Arah dan kebijakan pembangunan nasional yang meletakkan sektor kelautan sebagai prioritas sangat diperlukan, terutama dalam membangun pemahaman secara utuh para pemangku kepentingan yang terkait dengan sektor kelautan, sehingga pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dapat dilakukan dengan optimal dan lestari.



pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta fungsi laut harus dilaksanakan secara holistik mensinergikan semua potensi yang terkandung di laut

INDIKATOR KEBERHASILAN

Indonesia sebagai poros maritim dunia

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 70% luas wilayahnya terdiri atas laut, yang terbentang dalam panjang 5.200 km dan lebar mencapai 1.870 km, Indonesia memiliki peran penting dalam jalur perhubungan, transportasi dan perdagangan dunia. Letak geografis Indonesia menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat strategis pada jalur perdagangan laut dunia. Selat Malaka menjadi peringkat pertama jalur pelayaran kontainer global pada jalur *Sea Lane of Communication (SLoC)*.

Dengan memiliki akses utama ke pasar global, sektor kelautan dapat dimanfaatkan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan dukungan infrastruktur penunjang serta teknologi dan sumber daya manusia yang handal.

Orientasi pembangunan ekonomi nasional sudah seharusnya dikembangkan dengan paradigma ekonomi yang berbasis laut. Mendorong semaksimal mungkin pemanfaatan sumber daya laut (ekonomi sumber daya kelautan) serta memanfaatkan fungsi laut (ekonomi maritim).

Orientasi pembangunan ekonomi nasional sudah seharusnya dikembangkan dengan paradigma ekonomi yang berbasis laut. Mendorong semaksimal mungkin pemanfaatan sumber daya laut (ekonomi sumber daya kelautan) serta memanfaatkan fungsi laut (ekonomi maritim).

Kontribusi maksimal ekonomi sektor kelautan pada PDB

Sepanjang tahun 2014 kontribusi sektor kelautan subsektor perikanan terhadap PDB mencapai 6,97%. Kontribusi sektor kelautan subsektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih dapat terus ditingkatkan mengingat potensi ikan yang terkandung di laut Indonesia mencapai sekitar 65 juta ton per tahun dan baru 20% dari total potensi tersebut dapat dimanfaatkan.

Peningkatan kontribusi sektor kelautan terhadap pendapatan negara dapat terus dimaksimalkan dengan penggalan berbagai potensi yang terkandung dilaut. Terdapat 7 subsektor potensi laut dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Kontribusi ketujuh subsektor tersebut diproyeksikan mengandung potensi penerimaan negara mencapai nilai 171 miliar dollar AS. Sejauh ini, data Dewan Kelautan Indonesia penggalan potensi sumber daya kelautan pertahun 2008 hanya mencapai 569 triliun (Dekin, 2012).

Penggalan potensi yang dikandung oleh sektor kelautan akan dapat dimaksimal jika ada formulasi kebijakan yang tepat dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur kelautan yang memadai.

Kode	Sektor	Nilai Output (Rp Miliar)	Persentase (%)
I	Perikanan	135.347,49	2,61
II	Energi dan Sumber Daya Mineral	123.511,20	2,38
III	Industri Maritim	270.058,49	5,2
IV	Angkutan/Perhubungan Laut	23.523,41	0,45
V	Pariwisata Bahari	9.946,24	0,19
VI	Bangunan Penunjang Kegiatan Kelautan	161.001,49	3,1
VII	Jasa Kelautan	6.728,47	0,13
Total Kelautan		569.115,30	10,96

Tabel 4. Kontribusi Sektor Kelautan dalam PDB Nasional tahun 2008

Sumber: DEKIN, 2012

KONDISI PEMUNGKIN

Pergeseran paradigma dan pengarusutamaan: pembangunan ekonomi kelautan dan penguatan fungsi kemaritiman

Dalam rangka optimalisasi pembangunan ekonomi kelautan dan fungsi kemaritiman Indonesia, dibutuhkan pergeseran prioritas pembangunan dari yang selama ini lebih berat ke pembangunan daratan menuju pembangunan laut.

dibutuhkan perencanaan yang komprehensif dan berpihak terhadap kepentingan masyarakat serta lingkungan dalam membangun ekonomi kelautan. Paradigma *Blue Economy* (Ekonomi Biru) untuk pengembangan pembangunan laut akan dapat menjaga keseimbangan antara penggalan ekonomi kelautan dan daya dukung lingkungan. Konsep Ekonomi Biru akan dapat menjawab tantangan sistem ekonomi dunia cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya disebabkan oleh adanya limbah industri, akan tetapi kerusakan alam dan lingkungannya

Pengembangan ekonomi kelautan dengan model Ekonomi Biru sebagai akselerator bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

— Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia, 2012

juga disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang melebihi kapasitas atau daya dukung alam.

Kebijakan dan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi kelautan

Peningkatan dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan juga harus ditopang dengan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur yang mendukung. Pembangunan infrastruktur akan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi guna memaksimalkan dan memperluas pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah di belakangnya (*hinterland*).

Sebagai negara maritim, pembenahan kebijakan tata kelola dan penguatan sumber daya manusia di sektor kelautan dapat menjadi instrumen penting untuk mengungkit sektor kelautan menjadi sektor andalan (*leading sector*) dalam pembangunan nasional di masa depan.

Reformasi birokrasi dan tata niaga ekonomi kelautan

Reformasi birokrasi dan tata niaga ekonomi kelautan mutlak diperlukan melalui penyempurnaan regulasi dan arah pembangunan kelautan secara integral dan komprehensif sebagai payung kebijakan bagi semua instansi yang terkait pembangunan bidang kelautan. Sektor kelautan dapat diposisikan sebagai *leading sector* dalam pembangunan ekonomi nasional masa depan, oleh karenanya maka pendekatan kebijakan yang dilakukan harus mempertimbangkan keterkaitan antar sektor ekonomi dalam lingkup bidang kelautan maupun non-kelautan. Koordinasi antara semua pemangku kepentingan termasuk swasta dengan pemerintah harus diselenggarakan secara terpadu dan tidak bisa dilakukan secara parsial.

Penegakan hukum di sektor kelautan

Penegakan hukum di sektor kelautan merupakan upaya untuk melindungi kekayaan, kedaulatan dan keamanan wilayah laut Indonesia. Kondisi ini diharapkan akan mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pemanfaatan potensi dan fungsi laut secara maksimal dan berkelanjutan.

PERIODE TURBULENSI 2015 – 2020

Pembangunan infrastruktur kelautan

Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia, pengembangan infrastruktur kelautan yang memadai sehingga dapat menjadi jaringan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendukung penguatan fungsi kemaritiman lainnya.

Sarana pelabuhan yang handal, baik secara kualitas maupun kuantitas dibutuhkan untuk mewujudkan tumbuhnya aktivitas perekonomian di sektor laut. Integrasi semua aspek infrastruktur yang terkait dengan sektor kelautan juga harus dibangun demi mengintegrasikan moda transportasi darat, sungai dan udara dengan model ekonomi biru.

Pembangunan infrastruktur kelautan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi guna memaksimalkan dan memperluas pertumbuhan ekonomi.

Reformasi birokrasi dan tata niaga mencakup penyempurnaan regulasi dan arah pembangunan kelautan secara integral dan komprehensif

Pemanfaatan sumber daya laut sudah saatnya dijadikan sebagai tulang punggung pembangunan mengingat sumber daya alam yang tersedia di daratan juga terbatas.



Gambar 2. Konsep Tol Laut
 Sumber: Kementerian Perhubungan, 2015

Nama Pelabuhan Feeder	
1	Malahayati
2	Teluk Bayur
3	Batu Ampar Batam
4	Jambi
5	Palembang
6	Panjang
7	Tanjung Emas/Semarang
8	Pontianak
9	Sampit
10	Banjarmasin

Nama Pelabuhan Feeder	
11	Balikpapan
12	Samarinda
13	Pantolan
14	Kendari
15	Tenau Kupang
16	Ternate
17	Ambon
18	Sorong
19	Jayapura

Nama Pelabuhan Hub	
1	Belawan/Kuala Tanjung
2	Tanjung Priok/Kali Brau
3	Tanjung Perak
4	Makassar
5	Bitung

Pembangunan tata niaga kelautan yang berkelanjutan

Memasuki era persaingan pasar global, Indonesia dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki, antara lain sumber daya kelautan, secara optimal, efektif, efisien dan berkelanjutan. Laut Indonesia memiliki kandungan sumber daya alam yang sangat besar untuk dijadikan sumber bahan baku ekonomi yang potensial dan memiliki daya saing yang tinggi.

Pembangunan tata niaga kelautan yang berkelanjutan akan terwujud jika didasarkan pada konsep perencanaan yang terpadu. Pembangunan tata niaga laut yang berasaskan keterpaduan geografis, ekologis, antar *stakeholder*, antar sektor berperan penting untuk untuk mensinergikan kepentingan multi pihak di sektor kelautan dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan nasional yang bersumber pada ekonomi sektor kelautan.

Pengembangan industri kelautan

Penguatan industri kelautan ditempuh melalui pemanfaatan dan pendayagunaan potensi sumber daya laut, mencakup upaya-upaya strategis seperti mobilisasi investasi sektor kelautan, peningkatan daya saing produk kelautan, peningkatan kapasitas SDM serta penelitian dan pengembangan iptek. Penguatan industri kelautan ini harus dijalankan melalui kerjasama multi-pihak yang efektif dan setara antara pemerintah dan pihak pelaku usaha.

Pengembangan UKM bagi masyarakat pesisir dilakukan dalam bentuk inklusi keuangan dan penguatan kelembagaan usaha masyarakat nelayan.

PERIODE TRANSFORMASI 2020 – 2050

Peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir secara signifikan dan merata

Jumlah nelayan pertahun 2014 mencapai 2.667.440 nelayan, angka ini mengalami pertumbuhan 1,14% dibandingkan tahun 2013 (KKP; 2014). Dengan potensi laut yang begitu besar yang dapat dikapitalisasi sebagai pendapatan nasional, namun kondisi perekonomian nelayan berada pada garis kemiskinan. Rata-rata pengeluaran nelayan sekitar Rp 561.000 per bulan, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan yang bukan nelayan dengan rata-rata pengeluaran sebesar Rp 744.000 per bulan.

Pembangunan sektor kelautan harus mampu mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir khususnya nelayan, buruh pelabuhan serta masyarakat di wilayah pulau-pulau kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber ekonomi. Dibutuhkan dukungan semua pihak dalam pengembangan usaha kecil menengah bagi masyarakat pesisir, antara lain dalam bentuk inklusi keuangan, dukungan permodalan, penguatan kelembagaan usaha, peningkatan teknologi pengolahan dan dukungan pemasaran lanjutan. Pengembangan infrastruktur juga sangat dibutuhkan bagi nelayan seperti pabrik es, pusat pelelangan ikan, stasiun pengisian bahan bakar mini dan infrastruktur penunjang lainnya.



Gambar 3. Peta Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Sumber: BPS, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010

Pengurangan dampak pencemaran, pelestarian sumber daya laut dan mitigasi bencana di wilayah pesisir

Rehabilitasi sumber daya pesisir dan laut dilakukan untuk mengurangi dampak degradasi yang disebabkan oleh pencemaran, abrasi pantai, sedimentasi maupun eksploitasi berlebihan sektor kelautan. Penanggulangan degradasi tersebut harus dilakukan untuk mencegah rusaknya ekosistem dan sumber daya di wilayah pesisir, laut dan pualu-pulau kecil. Dalam *Convention on Biological Diversity (CBD)*, Indonesia telah berkomitmen dan menargetkan menambah luasan kawasan konservasi perairan laut. Strategi konservasi harus didasarkan pada kearifan pengelolaan lokal kawasan laut. Pemerintah, swasta dan masyarakat harus mampu menemukan rumusan tata kelola terbaik yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi kesejahteraan manusia dan tetap dapat melestarikan jasa dan fungsi ekosistem laut Indonesia.

4,69 juta Ha luas kawasan konservasi inisiasi Kemenhut mencakup 32 jumlah kawasan

11,09 juta Ha luas kawasan konservasi inisiasi KKP dan Pemda mencakup 76 jumlah kawasan

— Bappenas, Pembangunan Kelautan dalam RPJMN 2015-2019, 2014

VISI ELEMEN

Pertanian yang mandiri, unggul dan lestari

Sebagai negara agraris, pertanian memiliki peranan yang vital sebagai salah satu sektor pendorong utama pertumbuhan perekonomian Indonesia. Selain menyediakan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk serta bahan baku untuk beragam industri di Indonesia, sektor ini masih menjadi mata pencaharian lebih dari setengah penduduk Indonesia. Keberhasilan pembangunan pertanian akan berdampak langsung pada ketahanan dan keamanan pangan nasional.

Dengan perannya yang sangat strategis, sektor pertanian di Indonesia harus didorong dengan kebijakan yang dapat menguatkan kerangka regulasi, infrastruktur pertanian, pengembangan teknologi dan sumber daya manusia, serta pemberdayaan petani sendiri untuk dapat mencapai kondisi pertanian yang mandiri, unggul dan lestari.



Keberhasilan pembangunan pertanian akan berdampak langsung dalam ketahanan dan keamanan pangan nasional

INDIKATOR KEBERHASILAN

Kemandirian dan ketahanan pangan

Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi persoalan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan konsumsi bahan pokok pangan penduduknya. Kemandirian, ketahanan dan kemananan pangan menjadi isu sentral yang harus diwujudkan.

Pertambahan populasi penduduk menyebabkan bertambahnya kebutuhan lahan untuk pemukiman, pada saat yang sama terjadi alih fungsi lahan produktif pertanian untuk pemanfaatan di luar pertanian. Lahan pertanian produktif yang semakin berkurang merupakan awal dari ancaman ketahanan pangan yang tidak dapat dihindarkan di masa yang akan datang. Kemandirian pangan berbasis produksi domestik yang menunjukkan seberapa besar produksi pangan atau komoditas pangan tertentu dapat menyumbang atau dapat memenuhi ketersediaan pangan nasional, harus terus menjadi tujuan bersama.

Kontribusi maksimal ekonomi sektor pertanian pada PDB

Kontribusi ekonomis dari sektor pertanian terhadap PDB masih terbilang rendah. Kontribusi tersebut harus ditingkatkan melalui penambahan jumlah produksi pertanian nasional, sehingga akan mengurangi impor sekaligus meningkatkan ekspor pangan, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap PDB. Kondisi ini diharapkan akan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan kehidupan penduduk yang terlibat atau bekerja pada sektor pertanian.

Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa **dalam memproduksi Pangan yang** beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan **kebutuhan Pangan yang cukup** sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan **kearifan lokal secara bermartabat.**

—UU No 18 Tahun 12 Tentang Pangan

Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian dalam arti sempit (di luar perikanan dan kehutanan) pada tahun 2014, yaitu sekitar 879,23 triliun rupiah atau 10,26 % dari PDB nasional. Selama periode 2010-2014, pertumbuhan PDB pertanian sempit rata-rata diangka 3,90% (Renstra Kementan 2014-2019).

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional sangat mungkin dapat dimaksimalkan, kebijakan penataan pertanian secara menyeluruh (dari hulu hingga hilir) mutlak dibutuhkan.

KONDISI PEMUNGKIN

Kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor pertanian

Untuk meningkatkan pemasukan negara dari sektor pertanian, diperlukan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor pertanian pada tataran konsepsi maupun pada tataran operasional. Reformasi kebijakan dalam mendukung pertumbuhan sektor pertanian mutlak diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah.

Selain itu, peningkatan belanja pada sektor pertanian dan mendorong serapan secara maksimal harus menjadi prioritas pemerintah, terutama pada aspek pembangunan infrastruktur penunjang seperti irigasi, waduk dan lain sebagainya.

Peningkatan luasan lahan dan pengendalian konversi lahan pertanian, termasuk pengaturan tata guna dan kepemilikan lahan

Pada sektor pertanian, tidak bisa dipungkiri bahwa telah terjadi penyusutan lahan pertanian secara tajam dalam, Laju penyusutan sawah atau konversi lahan sawah mencapai 100 ribu hektar per tahun. Sementara kemampuan pemerintah dalam pencetakan sawah baru jauh dibawah laju konversi yaitu hanya mencapai 40 ribu hektar pertahun (Renstra Kementerian Pertanian 2014-2015).

No	Jenis Lahan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Sawah	7.991.564	8.068.427	8.002.552	8.094.862	8.132.345,91
1.a	Sawah Irigasi	4.828.476	4.905.107	4.893.128	4.924.172	4.417.581,92
1.b	Sawah Non Irigasi	3.162.988	3.163.220	3.109.424	3.170.690	3.714.763,99
2	Tegal/Kebun	11.707.380	11.782.332	11.877.777	11.626.219	11.949.727
3	Ladang/Huma	5.328.863	5.428.689	5.334.545	5.697.171	5.260.081
4	Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan	15.003.359	14.880.526	14.754.249	14.378.586	14.252.383
Jumlah (1+2+3+4)		15.003.359	14.880.526	14.754.249	14.378.586	14.252.383

Tabel 5. Luas Penggunaan Lahan di Indonesia (2008-2012)

Sumber: Statistik Lahan Pertanian (2008-2012); Kementerian Pertanian, 2013

Penyusutan lahan pertanian disebabkan diantaranya oleh kenaikan jumlah penduduk yang pesat diiringi dengan pertumbuhan wilayah pemukiman. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi seperti jalan dan industri juga menjadi penyebab penyusutan lahan pertanian.

Dibutuhkan kebijakan yang dapat mengurangi laju konversi lahan pertanian untuk fungsi lain, termasuk pengaturan tata guna dan kepemilikan lahan jika Indonesia ingin sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan di masa depan.

Pendampingan memadai kepada petani

Salah satu kendala yang dihadapi oleh sektor pertanian adalah rendahnya tingkat produksi yang dihasilkan. Salah satu penyebab rendahnya hasil produksi pertanian adalah karena rendahnya kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat pada sektor pertanian.

Peningkatan hasil produksi pertanian membutuhkan peningkatan kemampuan dan keterampilan petani, dengan cara memberikan pendampingan oleh tenaga pendamping dan penyuluh secara memadai dan berkesinambungan. Upaya ini jelas membutuhkan peran pemerintah pusat dan daerah serta keterlibatan aktif akademisi/lembaga kajian universitas dan korporasi.

Transfer dan penyebaran teknologi dan inovasi pertanian yang mengedepankan *Good Agricultural Practices (GAP)*

Berkembangnya produksi sektor pertanian di Indonesia menghadapi tantangan akan kualitas dan kuantitas hasil pertanian sebagai bagian kompetisi dan iklim persaingan global yang tak terhindarkan. Kini dibutuhkan jaminan standar mutu pertanian mulai dari hulu sampai hilir, dari mulai tahapan pra-produksi, produksi sampai dengan konsumsi.

Upaya peningkatan mutu dan standarisasi dilakukan melalui kebijakan penerapan SNI secara *mandatory* mulai dari tingkat petani sampai ke pelaku usaha. Salah satu bagian dalam penerapan standar mutu yaitu penerapan sistem jaminan mutu *Good Agricultural Practices (GAP)*, *Good Handling Practices (GHP)*, *Good Manufacturing Practices (GMP)* dan *Sanitary and Phytosanitary (SPS)* untuk perkarantinaan pertanian.

Good Agricultural Practices (GAP) merupakan standart untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan petani agar memenuhi kebutuhan konsumen dan memiliki daya saing tinggi dibandingkan dengan produk padanannya dari luar negeri. GAP terdiri dari 3 pilar utama, yaitu CROP atau tanaman, PEOPLE atau orang/ petani dan ENVIRONMENT atau lingkungan. Masing-masing pilar memiliki standard pengukuran yang digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan praktek pertanian yang baik.

[...]

Laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian selama periode 1998-2002 menunjukkan angka sekitar 110.000 Ha per tahun.

—BPS, 2013

[...]

Good Handling Practices (GHP) adalah cara penanganan pascapanen yang baik yang berkaitan dengan penerapan teknologi serta cara pemanfaatan sarana dan prasarana yang digunakan. Bagian ini berisi tentang tata cara, bangunan dan lingkungan, lokasi serta persyaratan dalam penanganan pangan pada setiap tahapan kegiatan penanganan pasca panen.

Good Manufacturing Practices (GMP) adalah sistem yang memuat persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh industri makanan dan kemasan, terkait dengan keamanan pangan, kualitas dan persyaratan hukum.

Sanitary and Phytosanitary (SPS) Salah satu persyaratan fundamental untuk impor (maupun untuk produk domestik) khususnya produk pertanian adalah produk pertanian tersebut harus aman dan tidak menimbulkan risiko kepada kesehatan manusia, binatang, dan tumbuhan. Untuk memastikan keamanan pangan dan untuk menghindari penyebaran penyakit dan hama melalui perdagangan, negara mempersyaratkan peraturan untuk melindungi kesehatan manusia dan binatang (tindakan *sanitary*) dan kesehatan tumbuhan (tindakan *phytosanitary*). Dalam rangka implementasi SPS di Indonesia telah ditetapkan Sekretariat Jenderal – DEPTAN. Pusat Standardisasi dan Akreditasi sebagai Central Government Authority (Notification Body) dan Badan Karantina Pertanian sebagai Enquiry Point.

Reformasi birokrasi dan tata niaga pertanian

Dalam rangka mewujudkan sektor pertanian yang maju, reformasi birokrasi dan tata niaga pertanian menjadi kunci mendasar. Salah satu wujud nyata dengan cara membentuk tata kelola sektor pertanian yang baik dan berkelanjutan, diawali dengan melakukan perbaikan mendasar terhadap sistem birokrasi dan tata niaga pertanian.

Langkah strategis dapat dilaksanakan melalui agenda delapan area perubahan sektor pertanian yang meliputi aspek kelembagaan, tata laksana, peraturan perundangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan perubahan paradigma dan budaya pertanian (Renstra Kementerian Pertanian 2014-2019).

Agenda delapan area perubahan meliputi kelembagaan, tata laksana, peraturan perundangan, sumber daya aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta *mindset* dan *cultural set* aparatur.

PERIODE TURBULENSI 2015 – 2020

Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian

Sarana dan prasarana penunjang memiliki peranan penting sebagai penggerak pembangunan pertanian, meliputi lahan, pengairan dan irigasi, pembibitan dan pembenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, investasi dan pembiayaan. Pada strategi ini perlu dilaksanakan segera perbaikan irigasi, pengembangan/pencetakan areal lahan sawah baru, pembentukan bank petani, modal usaha dan akses permodalan dan juga perbaikan jalur distribusi dan pemasaran hasil pertanian.

Pembangunan tata niaga pertanian dan bentuk-bentuk kemitraan usaha pertanian yang inklusif dan inovatif

Perbaikan sistem tata niaga pertanian menjadi salah satu syarat bagi pertumbuhan sektor pertanian. Tanpanya maka serapan hasil pertanian tidak akan dapat dilakukan secara maksimal. Dibutuhkan kemitraan usaha petani yang inklusif dan inovatif bersama antara pemerintah, petani dan perusahaan atau industri yang bergerak di sektor pertanian.

Dibutuhkan kemitraan usaha petani yang inklusif dan inovatif bersama perusahaan atau industri yang bergerak di sektor pertanian.

Pengembangan model bisnis inklusif

Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia terutama masyarakat petani miskin dapat dilakukan melalui skema kerjasama dengan pihak swasta. Pola ini dapat dikembangkan dengan cara mengembangkan model bisnis inklusif, sebuah pendekatan untuk menyediakan barang, jasa, dan mata pencaharian secara komersial kepada masyarakat miskin, dengan membuat mereka menjadi bagian dari rantai nilai bisnis inti perusahaan sebagai pemasok, distributor, pengecer, pekerja atau pelanggan. Bisnis inklusif hanya bisa terjadi jika ada inisiatif yang kuat dari sektor bisnis, didukung oleh kebijakan pemerintah dan kesediaan masyarakat untuk menyesuaikan diri dan terlibat dalam rantai nilai yang sedang berlangsung.

Model bisnis inklusif adalah model yang melibatkan segmen yang masih berpenghasilan rendah (*low income*) dalam proses dan rantai nilai usaha, baik sebagai tenaga kerja maupun pemasok (*supplier*) dan ataupun konsumen kedepannya. Selain itu proses bisnis inklusif juga mensyaratkan adanya pelibatan aktif dan partisipatif semua pemain dalam rantai nilai komoditi tersebut (termasuk dunia usaha). Segmen yang berpenghasilan rendah atau sering disebut dengan *Bottom of the Pyramid* (BoP) merupakan pasar potensial bagi pelaku bisnis dengan mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang tergolong dalam kelompok ini. BoP didefinisikan sebagai kalangan masyarakat dengan pendapatan kurang dari dua dolar per hari (masyarakat miskin). Meski daya beli BoP relatif paling rendah dibandingkan segmen di atasnya, namun secara agregat BoP memiliki keunggulan. Jika kuantitas dikalikan dengan daya beli rata-rata, maka nilai agregat akan naik.

Peningkatan jenis, kuantitas dan kualitas produk pertanian

Peningkatan jenis (diversifikasi) pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional harus dilihat dalam kerangka peningkatan daya saing produk pertanian baik secara kuantitas maupun kualitas. Strategi yang dapat dikembangkan antara lain dengan penjaminan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan secara terpadu, mendorong keragaman konsumsi, pengembangan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya.

PERIODE TRANSFORMASI 2020 – 2050

Peningkatan kesejahteraan petani secara signifikan dan merata

Pelaksanaan pembangunan pertanian pada dasarnya harus berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor pertanian secara nasional mencapai 35 juta tenaga kerja atau 26,14 juta rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian. Hasil ST2013 menunjukkan bahwa dari sebesar 98,53 persen rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan, sebesar 55,33 persennya (14,25 juta rumah tangga) merupakan rumah tangga petani gurem.

Peningkatan kesejahteraan petani akan dapat dicapai antara lain dengan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani, pengembangan kelembagaan/kelompok petani, penyediaan saprodi (benih, pestisida, pupuk dan sarana produksi lainnya), mempermudah akses permodalan dan implementasi inklusi keuangan.

Pengurangan dampak kerusakan ekosistem, pengembangan model pertanian yang lestari

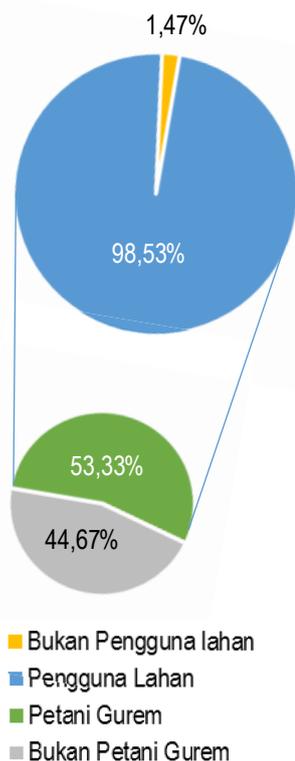
Pola pertanian yang tidak ramah lingkungan telah memberikan sumbangan terhadap rusaknya ekosistem pertanian. Konsep pertanian ramah lingkungan dan lestari merupakan konsep pertanian ekologis dan konservatif dan berkelanjutan untuk merespon kerusakan lingkungan. Upaya-upaya pemanfaatan teknologi yang lebih ramah lingkungan harus dipercepat,

Dalam Renstra yang disusun oleh Kementerian Pertanian 2014-2019 telah direncanakan pembuatan 100 *techno park* dan 34 science park di 34 propinsi, program ini didorong untuk mengembangkan inovasi pertanian yang berbasis bio industri yang berkelanjutan.

Program lain untuk pengurangan dampak kerusakan ekosistem dari aktivitas pertanian, pemerintah juga telah merencanakan program 1000 desa pertanian organik yang lebih ramah lingkungan.

Secara bahasa “technopark” dapat diartikan sebagai taman teknologi adalah suatu tempat/kawasan dimana teknologi diaplikasikan atau diartikan sebagai area perguruan tinggi yang dapat dipergunakan oleh masyarakat industri terutama masyarakat industri pertanian.

ujuan utama pendirian “technopark” adalah untuk membuat link yang permanen antara perguruan tinggi (akademisi), pelaku industri/bisnis/finansial, dan pemerintah. Technopark mencoba menggabungkan ide, inovasi, dan *know-how* dari dunia akademik dan kemampuan finansial (dan marketing) dari dunia bisnis pertanian. Diharapkan penggabungan ini dapat meningkatkan dan mempercepat pengembangan produk terutama produk pertanian serta mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan inovasi ke produk yang dapat dipasarkan, dengan harapan untuk memperoleh *economic return* yang tinggi.



Grafik 5. Perbandingan Rumah Tangga Pertanian Pengguna Lahan dan Petani Gurem

Sumber: Sensus Pertanian (ST), 2013

VISI ELEMEN

Hutan yang lestari dan pemanfaatan berkelanjutan atas hasil hutan

Hutan Indonesia merupakan hutan tropis yang terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo. Data resmi Kementerian Kehutanan (2010) mencatat luas kawasan hutan di Indonesia adalah sekitar 133 juta hektar. Demi kelestarian dan keberlanjutan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan manusia, hutan harus dikelola dengan memperhitungkan batas daya dukung ekosistem hutan dalam memanfaatkan hasil hutan.

Sumber daya hutan merupakan sumber daya alam yang sangat erat keterkaitannya dengan lingkungan hidup, baik secara fisik maupun sosial budaya. Kerusakan sumber daya hutan dapat berpengaruh pada perubahan iklim, kerusakan fungsi alam, kerusakan lingkungan hidup bahkan hingga hilangnya budaya dan kearifan lokal. Oleh karenanya, pemanfaatan hutan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan secara berimbang.



pemanfaatan hutan dalam mewujudkan kelestarian sumber daya hutan dilakukan secara berkesinambungan dan memiliki manfaat sosial ekonomi sebesar-besarnya

INDIKATOR KEBERHASILAN

Penurunan laju kerusakan dan kehilangan kawasan hutan

Hutan Indonesia dihadapkan pada berbagai ancaman kerusakan hutan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti penebangan hutan, pembalakan liar, pembukaan kawasan hutan, fragmentasi dan konversi lahan menjadi bentuk pemanfaatan lain, kebakaran hutan dan berbagai permasalahan lain seperti perubahan pola musim dan peningkatan erosi tanah.

Laju deforestasi terjadi di daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan yang luas seperti Kalimantan dan Sumatera. Kebijakan moratorium atau penundaan pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut menjadi solusi sementara yang diambil oleh pemerintah.

Dalam rangka menyeimbangkan dan menselaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang dilakukan melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, Presiden mengintruksikan kepada menteri terkait (dalam hal ini Kemenhut) untuk melakukan penundaan terhadap penerbitan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru. (Inpres No. 10 Tahun 2011)

Luas kawasan hutan di Indonesia mencapai sekitar 133 juta Ha. Luasan kerusakan hutan atau deforestasi hutan dalam kurun waktu tahun 2000 sampai 2009 diperkirakan sebesar 15,15 juta Ha per tahun.

—Kementerian Kehutanan, 2010

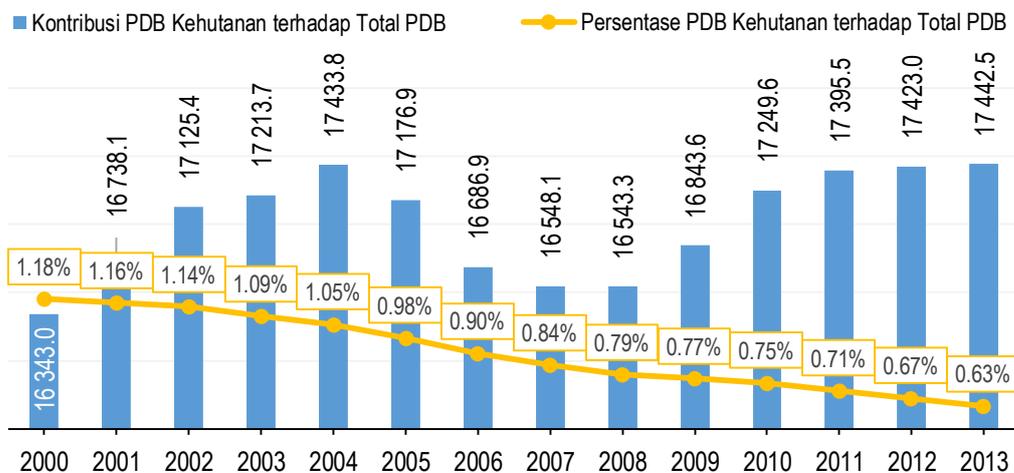
Dalam jangka panjang harus ada solusi permanen untuk menahan laju kerusakan hutan yang dapat ditempuh antara lain melalui upaya memperketat izin pemanfaatan hutan, melakukan pengawasan secara ketat dan berkala serta penegakan hukum yang memadai.

Kontribusi maksimal ekonomi sektor kehutanan pada PDB

Selain nilai ekologis dan sosial budaya, hutan memainkan peranan penting dalam mempertahankan perekonomian nasional dan mendukung mata pencaharian melalui jasa ekosistem dan kesempatan lapangan kerja yang diberikannya. Dari data yang dilansir Badan Pusat Statistik di atas, sektor kehutanan pada tahun 2013 hanya menyumbang 17,4 triliun rupiah atau sebesar 0,63% dari total PDB.

Grafik 6. Kontribusi PDB Kehutanan terhadap Total PDB dan Persentase Kontribusi PDB Kehutanan terhadap Total PDB (Atas Dasar Harga Konstan 2000 – 2013)

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2000-2013



Tren kontribusi pendapatan negara dari sektor kehutanan harus terus ditingkatkan agar sebanding dengan potensi dan jumlah kawasan hutan yang dimiliki. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti rotan, getah karet, pasak bumi, akar kuning, anggrek, gingseng, sarang semut, jamur seperti babi hutan, rusa, kijang, kancil, landak, lebah madu dan tanaman obat perlu dikelola dengan lebih baik sebagai sumber pendapatan negara.

Hasil Studi Penilaian Ekosistem Hutan Indonesia yang dilakukan oleh UNEP dan UNORCID (2012) menyatakan bahwa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) memiliki potensi ekonomi yang signifikan bagi Indonesia karena produksi HHBK telah sangat meningkat selama satu dekade terakhir ini. Secara keseluruhan, industri tanaman obat dan industri minyak atsiri berakar kuat di seluruh negeri. Bahkan, selama tahun 2011, industri tanaman obat menghasilkan produk senilai lebih dari 1 miliar dolar AS, sekarang Indonesia adalah produsen 8 jenis minyak atsiri terbesar di dunia. Kontribusi ekonomi ini memiliki kapabilitas pengembangan yang menjanjikan di masa mendatang, tetapi tergantung pada kondisi hutan Indonesia, dan seberapa baik hutan-hutan ini dilindungi.

—UNEP dan UNORCID, 2012

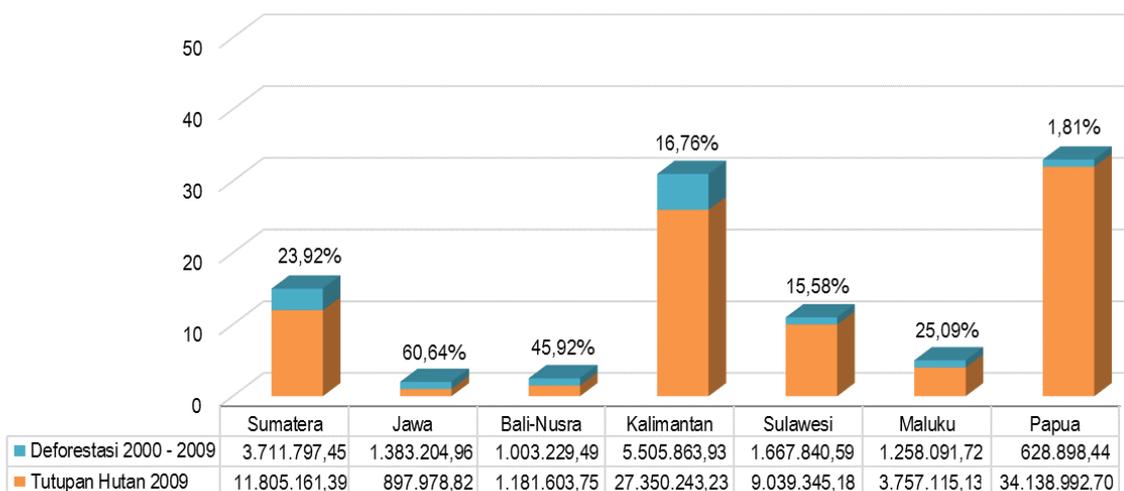
KONDISI PEMUNGKIN

Kebijakan yang menekan laju kerusakan dan kehilangan kawasan hutan

Forest Watch Indonesia/Global Forest Watch (FWI/ GFW, 2001) dalam laporan “Keadaan Hutan Indonesia” dan Forest Watch Indonesia (2011) dalam laporan “Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009” menyebutkan luasan deforestasi hutan dihitung FWI dengan membandingkan tutupan hutan pada tahun 2009 dengan kondisi pada tahun 2000, dan menghasilkan perkiraan luasan deforestasi total periode 2000 – 2009 sebesar 15,15 juta Ha.

Selain kebijakan moratorium untuk menghentikan sementara penerbitan izin pemanfaatan hutan, diperlukan kebijakan lain dalam menekan laju deforestasi Indonesia secara optimal.

Bencana kebakaran hutan skala besar menjadi trend yang berulang-ulang tiap tahunnya. sejumlah penyebab utama kebakaran hutan, termasuk penyiapan lahan bagi pertanian, pembalakan liar, jaminan kepemilikan lahan masyarakat yang tidak pasti dan spekulasi lahan (CIFOR, 2001). Untuk mengantisipasi bencana kebakaran asap penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas, keras, dan cepat kepada setiap badan atau perseorangan yang melakukan pelanggaran hukum terhadap pemanfaatan hutan.



Grafik 7. Deforestasi di Indonesia Periode Tahun 2000 – 2009 (dalam juta Ha)

Sumber: Forest Watch Indonesia, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009, 2011

Terlaksananya kebijakan desentralisasi tata kelola kehutanan, melalui pembentukan dan operasionalisasi KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)

Tata kelola hutan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan pasca reformasi dengan bergesernya paradigma pengelolaan hutan yang sentralistik ke pengelolaan hutan yang desentralistik. Dengan kebijakan yang terdesentralistik diharapkan tata kelola hutan menjadi lebih baik. Namun menurut berbagai kajian, dalam 10 tahun kebijakan desentralisasi dilakukan, degradasi dan deforestasi hutan sangat tinggi di Indonesia melalui ijin-ijin konsesi hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tanpa dibarengi oleh pengawasan yang ketat.

Melalui pembentukan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yang juga merupakan model desentralisasi bukan dalam konteks pemberian ijin, tapi lebih merupakan desentralisasi manajemen/pengelolaan hutan. Pembentukan KPH merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi pemungkin (*enabling conditions*) dicapainya pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan (Badan Planologi Kehutanan, 2006). Pembentukan KPH dapat menjadi solusi bagi pembenahan kelembagaan kehutanan supaya prinsip-prinsip tata kelola hutan yang berkelanjutan dapat terlaksana.

Perbaikan atas tata ruang dan tata guna kawasan hutan (pemantapan kawasan) berbasis ekosistem

Undang-undang kehutanan menyebutkan bahwa hutan merupakan satu kesatuan utuh ekosistem. Hutan juga menyediakan fungsi dan jasa ekosistem bagi kehidupan manusia. Tata ruang dan tata guna kawasan hutan harus diatur berbasis keutuhan dan keluasan ekosistem.

Pemantapan kawasan hutan merupakan bagian yang sangat strategis dalam pengelolaan hutan berkelanjutan mengingat semakin kritisnya kondisi hutan di Indonesia. pemantapan kawasan hutan dapat dilaksanakan dengan membangun upaya-upaya pendataan ulang kondisi aktual kawasan hutan beserta isinya, redesain fungsi hutan, penyesuaian tata ruang dan tata guna hutan provinsi dan kabupaten/kota, penanganan konflik lahan hutan dan masalah-masalah *land tenure*, penyelesaian tata batas dan pengukuhan kawasan hutan.

Perbaikan atas tata ruang dan tata guna kawasan hutan berbasis ekosistem menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan para pemangku kepentingan dalam aktivitas pengelolaan kawasan hutan.

PERIODE TURBULENSI 2015 – 2020

Perbaikan tata kelola hutan yang lestari

Perkembangan perbaikan tata kelola hutan di Indonesia masih tergolong belum optimal, dalam laporan Forest Watch Indonesia (FWI,2011) mencatat laju deforestasi total periode 2000 – 2009 mencapai sebesar 15,15 juta ha. Bencana asap yang menjadi ritual tahunan menjadi penguat bahwa perbaikan tata kelola hutan di Indonesia masih jauh dari harapan.

Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dapat menjadi upaya pengelolaan hutan di tingkat tapak untuk mewujudkan terlaksananya tata kelola hutan yang lestari dan berkeadilan. Perubahan cara berfikir, sistem nilai dan budaya pengurusan hutan di Indonesia yang dikembangkan di dalam KPH akan memberikan dampak pada terwujudnya tatakelola hutan yang lestari.

Mendorong peningkatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

Hutan memiliki potensi sumber daya beragam selain kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan pemanfaatan potensi hasil hutan selain kayu atau sering disebut Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) harus berorientasi pada peningkatan usaha budidaya dan pemanfaatan produksi

yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat bagi masyarakat dalam dan sekitar hutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hutan.

Untuk mengoptimalkan potensi hutan bukan kayu, perlu dilakukan upaya-upaya yang serius dari berbagai pihak, pemerintah dan sektor swasta. Penguatan dan pengembangan usaha tani, Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat, membuka akses Permodalan dan Pemasaran bagi masyarakat atau kelompok masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu serta Pengembangan Penelitian dan Teknologi untuk menggali potensi HHBK.

Dalam konsep pembangunan ekonomi berbasis jasa hutan, orientasi pemanfaatan HHBK menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional sehingga optimalisasi penggalian sumber daya hutan dapat dilakukan secara efektif.

PERIODE TRANSFORMASI 2020 – 2050

Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan

Data statistik tahun 2013 menunjukkan jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 28,55 Juta Jiwa. 17,92 juta jiwa diantaranya tinggal di daerah pedesaan, di dalam dan sekitar kawasan hutan. Sedangkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2014) menunjukkan bahwa sekitar 8,6 juta jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan, Rumah tangga di sekitar kawasan hutan adalah rumah tangga yang bermukim di desa yang berada di dalam dan di tepi kawasan hutan.

Dalam catatan Kementerian KLH hampir 27% dari jumlah desa berada dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Desa-desa yang terdapat di perbatasan kawasan hutan belum cukup mendapatkan akses untuk pengelolaan sumberdaya hutan untuk dijadikan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat, sehingga sangat rentan menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Desa-desa yang terdapat di perbatasan kawasan hutan belum cukup mendapatkan akses untuk pengelolaan sumberdaya hutan untuk dijadikan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat, sehingga sangat rentan menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Ironis jika ternyata desa-desa yang berdampingan dengan sumber daya hutan sangat rentan dengan kemiskinan. Kondisi inilah yang kemudian membuat aktivitas masyarakat di sekitar hutan menjadi ancaman bagi kelestarian hutan.

Perlu ditemukan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, mulai dari optimalisasi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, model kelola agroforestry, pertanian ladang yang berkelanjutan, pengelolaan jasa ekosistem lainnya, hingga berbagai skema pelibatan masyarakat oleh korporasi pemegang ijin konsesi kawasan hutan produksi.

Restorasi ekosistem menjadi model bisnis untuk perlindungan dan pelestarian hutan

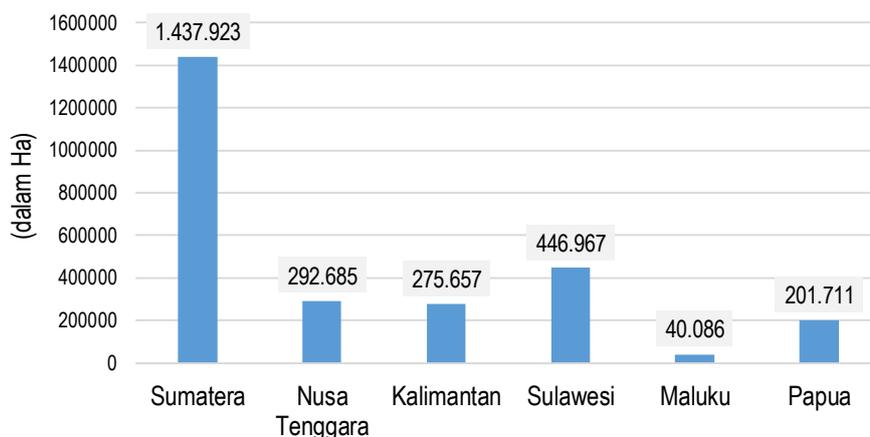
Pendekatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan berbasis restorasi ekosistem merupakan paradigma baru dalam membangun model bisnis yang dapat melindungi dan melestarikan hutan. Pendekatan ini akan lebih diutamakan

pada pemanfaatan jasa ekosistem dan pemanfaatan berkelanjutan hasil hutan bukan kayu. Restorasi ekosistem diharapkan dapat mengembalikan resiliensi ekosistem hutan dan pemulihan kondisi hutan yang telah terdegradasi.

No	Nama Ijin Konsesi	Provinsi	Luas (Ribu Ha)
1	PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (2007)	Sumatera Selatan	52.17
2	PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (2010)	Jambi	46.385
3	PT. Restorasi Habitat Orangutan Indonesia (2010)	Kalimantan Timur	86.45
4	PT. Ekosistem Katulistiwa Lestari (2011)	Kalimantan Barat	14.08
5	PT. Gemilang Cipta Nusantara (2012)	Riau	20.265
6	PT. Rimba Raya Conservation (2013)	Kalimantan Tengah	37.151
7	PT. Spes Biodiversity Indonesia (2013)	Bengkulu	12.672
8	PT. Rimba Makmur Utama (2013)	Kalimantan Tengah	108.255
Total Luas			377.255

Tabel 6. IUPHHK-RE yang Telah Dikeluarkan Pemerintah

Sumber: Dirjen BUK, Kemenhut



Grafik 8. Target Pengembangan IUPHHK-RE

Sumber: SK Menhut No. 5040/2013

Keterangan: IUPHHK-RE (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem)

Dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan nasional berkelanjutan diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan dan peningkatan perekonomian nasional termasuk perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui deregulasi dan debirokratisasi yang dilandasi prinsip *good Forest governance* dan pengelolaan hutan lestari.

VISI ELEMEN

Kemandirian dan ketahanan energi untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan

Salah satu faktor penting pendukung pembangunan adalah kemandirian dan ketahanan energi nasional, yang diwujudkan berdasarkan strategi dan peta jalan energi jangka panjang. Sebagai bangsa yang sesungguhnya kaya akan sumber daya energi baik fosil maupun energi baru dan terbarukan, Indonesia memiliki peluang besar untuk dapat mandiri dan memiliki ketahanan energi yang kuat.

Perubahan paradigma dan orientasi pembangunan energi yang kini sangat dibutuhkan menggeser titik tumpu pada pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Energi fosil yang terbatas jumlahnya akan terus mengalami penipisan yang jika tidak diantisipasi secara tepat dan cepat maka akan membawa Indonesia ke situasi kelangkaan dan krisis energi nasional, yang pada gilirannya nanti akan menjadi penghambat utama rencana pembangunan nasional dalam jangka panjang.

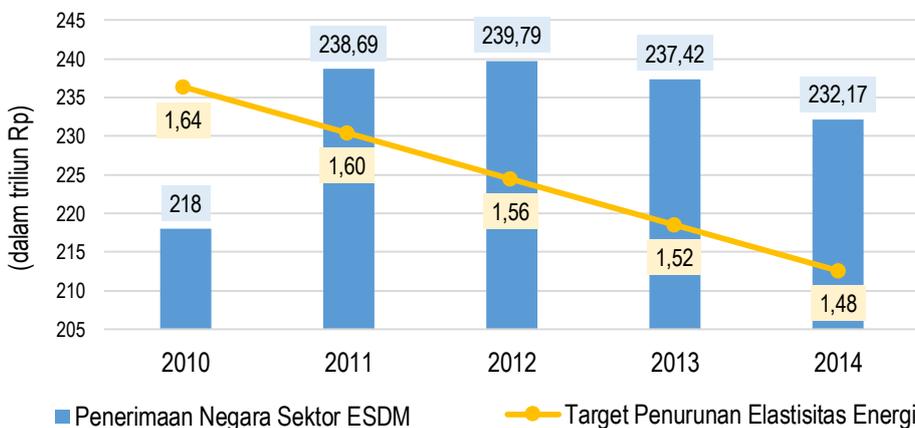


pemanfaatan energi berorientasi pada keberlanjutan sehingga pemanfaatan energi baru terbarukan menjadi strategi utama

INDIKATOR KEBERHASILAN

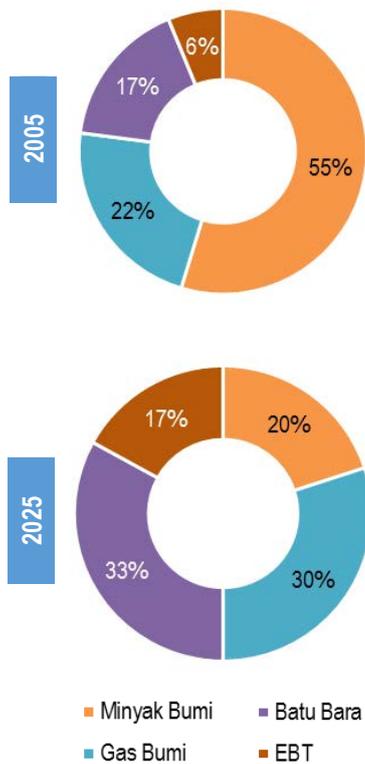
Menurunnya elastisitas energi dan meningkatnya intensitas energi nasional secara signifikan dan permanen

Elastisitas energi merupakan indikator pemanfaatan energi yang mengukur tingkat efisiensi penggunaan energi dalam pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi ternyata diiringi dengan tingkat ketidakefisienan dalam pemanfaatan energi yang juga cukup tinggi.



Grafik 9. Perbandingan Penerimaan Negara Sektor ESDM dengan Tingkat Elastisitas Energi

Sumber: Renstra ESDM 2010-2014



Grafik 10. Bauran Energi Indonesia Tahun 2005 dan Target Bauran Energi Indonesia Tahun 2025

Sumber: Kementerian ESDM (2013), *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia (2013)*

Keberhasilan pembangunan energi akan ditunjukkan dengan pengelolaan energi yang berkelanjutan, dengan menurunkan angka elastisitas energi sekaligus meningkatkan intensitas energi nasional secara signifikan dan permanen.

Tercukupinya kebutuhan energi dengan komposisi bauran energi yang ideal

Paradigma penggunaan energi fosil sebagai energi utama dipastikan akan membawa Indonesia ke dalam situasi kelangkaan energi. Produksi minyak bumi Indonesia hanya akan bertahan selama 23 tahun setelah tahun 2006 (atau tersisa 18 tahun sejak sekarang!).

Indonesia memiliki potensi energi non fosil yang sangat tinggi dan dapat dikonversi menjadi pengganti energi fosil. Dalam catatan Indonesia Mining Association (IMA) menyebutkan bahwa panas bumi Indonesia sebagai salah satu sumber energi terbarukan sesungguhnya meliputi 40% dari total cadangan dunia. Renstra Kementerian ESDM 2014-2019 menargetkan pemanfaatan energi non-BBM dalam bauran energi nasional diarahkan pada peningkatan porsi energi baru terbarukan (EBT), dimana ditargetkan sebesar 10% pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 16% pada tahun 2019.

Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional menyebutkan bahwa potensi sumber energi ramah lingkungan Indonesia pada tahun 2005 baru berkontribusi sebesar 6,2% dari total keseluruhan penggunaan energi nasional. Kebijakan nasional tersebut menargetkan EBT dapat menyumbang 17% energi nasional pada tahun 2025.

KONDISI PEMUNGKIN

Arah kebijakan ketahanan energi nasional, terkait dengan isu perubahan iklim

Keberhasilan pembangunan energi nasional sesuai arahan strategi dan peta jalan energi yang telah ditetapkan, membutuhkan kebijakan yang berorientasi pada ketahanan energi nasional. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan energi nasional yang bertujuan memberikan jaminan keamanan pasokan energi dalam negeri, dengan memproyeksikan elastisitas energi berada di bawah 1 (satu) pada tahun 2025. Disamping itu komposisi penggunaan energi baru dan terbarukan perlu didorong lebih optimal. Optimalisasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan tersebut merupakan salah satu upaya taktis dalam mitigasi isu perubahan iklim.

Konservasi energi dapat dilakukan baik dari sisi hulu sampai hilir, meliputi pengelolaan sumber daya energi dan seluruh tahapan eksplorasi, produksi, transportasi, distribusi, dan pemanfaatan energi dan sumber energi. Diarahkan untuk menjamin agar penyediaan dan pemanfaatan sumber daya energi tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya energi tersebut.

Kebijakan dan insentif yang mendukung pergeseran bauran energi nasional dan konservasi/efisiensi energi

Indonesia memerlukan kebijakan dan insentif yang dapat mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan guna mendorong keberhasilan rencana bauran energi nasional. Bentuk kebijakan yang dibutuhkan antara lain adalah adanya insentif bagi upaya eksplorasi dan pengembangan energi non-konvensional, termasuk insentif bagi pelaku konservasi dan pegiat efisiensi energi.

Pemerintah juga perlu untuk mendorong adopsi teknologi energi baru dan terbarukan, percepatan lisensi dan perizinan bagi investasi dibidang energi terbarukan.

Pengurangan/penghapusan subsidi energi atau disinsentif bagi penggunaan *non-renewable energy*

Perlu pengurangan/penghapusan pemberian subsidi terhadap penggunaan energi terutama subsidi penggunaan BBM di Indonesia. Dana subsidi BBM selama ini dapat dire-alokasikan untuk memberikan insentif pengembangan energi baru dan terbarukan.

Pemerintah perlu melakukan penyesuaian harga keekonomisan BBM sesuai dengan harga pasar, beban subsidi BBM yang tinggi dikeluarkan oleh pemerintah dapat dialihfungsikan untuk memberikan insentif bagi pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan dapat di realokasikan untuk pembangunan infrastruktur penunjang energi yang ramah lingkungan.

PERIODE TURBULENSI 2015 – 2020

Pembangunan/perbaikan infrastruktur dan sarana penyediaan energi yang handal

Pembangunan energi dan kelistrikan nasional menghadapi persoalan umumnya terkait dengan penyediaan infrastruktur energi yang handal seperti infrastruktur pembangkit, penyediaan, penyaluran dan distribusi energi. Untuk mempercepat pemenuhan target pembangunan energi nasional, dibutuhkan upaya dan kerja keras pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan sarana penunjang dalam waktu segera.

Perbaikan atau pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan BUMN agar eksplorasi terhadap potensi-potensi sumber daya energi dapat dilakukan dengan segera sesuai dengan strategi dan peta jalan pembangunan energi nasional.

Dalam rencana kerja pemerintah 2015-2019 telah ditetapkan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW

Tabel 7. Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik per Wilayah di Indonesia 2015-2019

Wilayah Sumatera			Wilayah Jawa-Bali		
	Program	On Going		Program	On Going
PLN	1,11 GW (23 unit)	1,43 GW (14 unit)	PLN	5,02 GW (19 unit)	1,21 GW (6 unit)
IPP	7,63 GW (49 unit)	1,14 GW (18 unit)	IPP	15,87 GW (76 unit)	1,75 GW (12 unit)
Total	8,74 GW (72 unit)	2,57 GW (32 unit)	Total	20,89 GW (95 unit)	2,96 GW (18 unit)

Wilayah Kalimantan			Wilayah Nusa Tenggara		
	Program	On Going		Program	On Going
PLN	0,92 GW (18 unit)	0,88 GW (28 unit)	PLN	0,66 GW (16 unit)	0,19 GW (15 unit)
IPP	0,96 GW (12 unit)	0,09 GW (7 unit)	IPP	0,05 GW (9 unit)	0,08 GW (6 unit)
Total	1,87 GW (30 unit)	0,97 GW (35 unit)	Total	0,71 GW (25 unit)	0,27 GW (21 unit)

Wilayah Sulawesi			Wilayah Maluku		
	Program	On Going		Program	On Going
PLN	2,02 GW (28 unit)	0,33 GW (15 unit)	PLN	0,26 GW (18 unit)	0,05 GW (5 unit)
IPP	0,68 GW (40 unit)	0,14 GW (10 unit)	IPP	0,02 GW (4 unit)	-
Total	2,70 GW (68 unit)	0,47 GW (25 unit)	Total	0,28 GW (22 unit)	0,05 GW (5 unit)

Wilayah Papua			Total Indonesia		
	Program	On Going		Program	On Going
PLN	0,22 GW (19 unit)	0,07 GW (8 unit)	PLN	10,21 GW (141 unit)	4,16 GW (91 unit)
IPP	0,12 GW (17 unit)	-	IPP	25,33 GW (207 unit)	3,2 GW (53 unit)
Total	0,34 GW (36 unit)	0,07 GW (8 unit)	Total	35,56 GW (348 unit)	7,37 GW (144 unit)

Sumber: Renstra KESDM 2015-2019

Penyediaan dan pemanfaatan energi secara optimal dan berkelanjutan, serta distribusi energi secara merata

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau yang tersebar diseluruh penjuru nusantara, Indonesia memiliki rantai persoalan yang kompleks dalam penyediaan dan pemanfaatan energi untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan industri secara merata. Perlu dilakukan investasi dalam skala besar untuk meningkatkan dan memperbaiki jaringan infrastruktur distribusi energi serta fasilitas penyimpanan dan armada tanker demi memastikan penyediaan energi yang optimal dan distribusi yang proporsional sesuai kebutuhan.

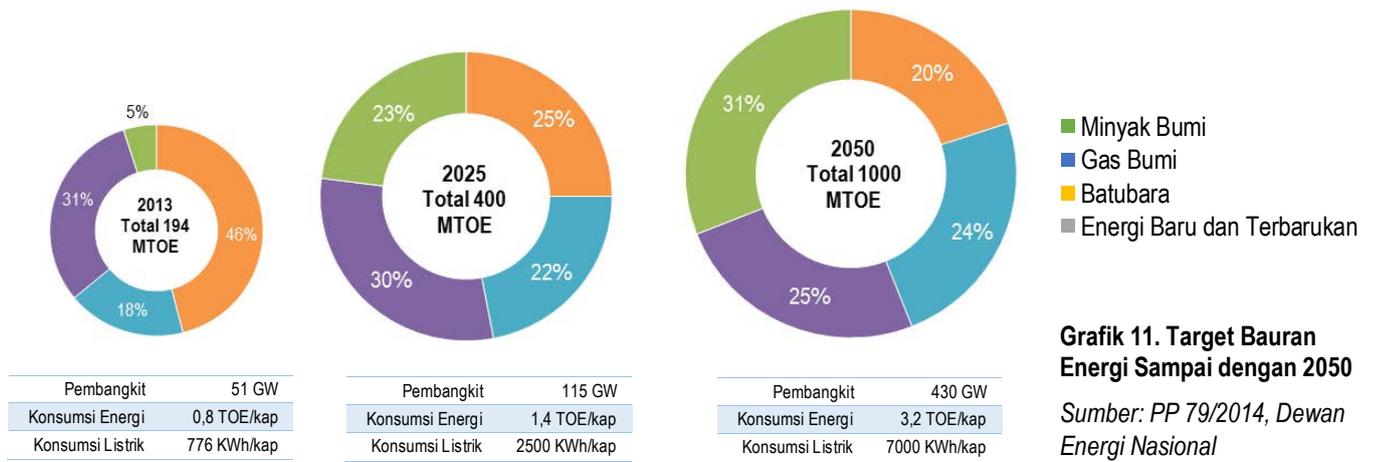
Perbaikan bauran energi (diversifikasi energi) nasional

Indonesia memiliki potensi sumber energi baru dan terbarukan yang cukup besar seperti energi surya, sumber air, angin, panas bumi dan gas. Kebijakan perbaikan bauran energi perlu mendapatkan prioritas dalam pembanguna energi nasional mengingat energi fosil mengalami penurunan produktifitas.

Perbaikan bauran energi (diversifikasi energi) nasional dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan perubahan terhadap PP No 5 tahun 2006 dengan PP No 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional. Perubahan Peraturan Pemerintah tersebut memberikan perbaikan proyeksi

pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam baruan energi. Pada tahun 2025 target pemanfaatan energi terbarukan mencapai 23%, dan target tersebut meningkat pada tahun 2050 pemanfaatan energi baru terbarukan mencapai 31%.

Strategi percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam pemabangunan energi nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh PP No 79 Tahun 2014 dapat dilakukan dengan penyediaan infrastruktur penunjang yang memadai untuk pemanfaatan berbagai jenis sumber energi baru dan terbarukan. Mendorong peningkatan peran serta swasta dalam investasi di sektor energi terbarukan dengan memberikan kemudahan perijinan dan insentif dapat menjadi strategi lain dalam upaya mempercepat pertumbuhan pengelolaan energi nasional (EBT).



Grafik 11. Target Bauran Energi Sampai dengan 2050

Sumber: PP 79/2014, Dewan Energi Nasional

PERIODE TRANSFORMASI 2020 – 2050

Penggalian sumber energi baru

Terus meningkatnya kebutuhan energi untuk menopang pertumbuhan ekonomi serta menipisnya cadangan energi konvensional seperti bahan bakar minyak dan batu bara memaksa semua pihak untuk memaksimalkan potensi sumber-sumber energi alternatif, penggalian sumber energi baru dan mendorong investasi pembangunan industri energi. Penggalian sumber energi baru menjadi prioritas, terutama pemanfaatan energi baru dan terbaru seperti jenis energi air, panas bumi, arus laut dan angin dan bahan energi yang bersumber dari bahan nabati.

Rencana Aksi	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Pembangunan PLTA & PLTMH	MW	230,7	910,2	339,7	490,0	540,0
- Pembangunan PLTA & PLTMH	MW	222,0	889,0	326,0	477,0	527,0
- PLTA & PLTMH non-APBN	MW	0,7	1,7	4,0	3,0	2,0
- PLTMH APBN KESDM	MW	8,0	9,5	9,7	10,0	11,0
Kapasitas Terpasang	MW	8.342	9.252	9.592	10.082	10.622

Tabel 8. Pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA & PLTMH) 2015-2019

Sumber : Renstra KESDM 2015-2019

Konservasi dan efisiensi energi

Konservasi energi dilakukan untuk meningkatkan penggunaan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi kuantitas energi yang memang benar-benar diperlukan. Upaya konservasi energi dapat diterapkan pada seluruh tahap mulai dari pemanfaatan sumber daya energi sampai pada pemanfaatan akhir dengan menggunakan teknologi yang efisien dan membudayakan pola hidup hemat energi. Konservasi membutuhkan upaya-upaya yang konsisten dari semua pihak untuk menjadikan energi baru terbarukan dan konservasi energi menjadi *mainstream*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi menjelaskan konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energy dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Dalam Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat dengan mengacu pada rencana induk konseservasi energi nasional.

Indonesia masih cenderung boros dalam pemakaian energi. Ini dapat dilihat dari laju konsumsi BBM selama sepuluh tahun terakhir mencapai rata-rata di atas 6 persen per tahun. Laju ini termasuk tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara yang rata-rata hanya mencapai sekitar 1 persen per tahun (Renstra ESDM 2015-2019). Penggunaan BBM selama ini cenderung tidak terarah, konsumtif dan bersifat pemborosan.

Kesadaran hemat energi bagi pengguna harus terus ditingkat, baik itu dari pemerintah, industri maupun masyarakat. Dukungan kebijakan berupa insentif dan disinsentif untuk pelaksanaan energi efisiensi dan konservasi energi serta membangun sistem monitoring dan evaluasi dari hasil pelaksanaan konservasi energi lintas sektor.

VISI ELEMEN

Pariwisata berbasis kebudayaan lokal, pilar pembangunan masa depan

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa dan dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan bernilai ekonomi tinggi. Selain sebagai negara kepulauan yang memiliki beragam destinasi wisata kelas dunia, Indonesia juga terdiri atas beragam budaya dengan masing-masing kearifan lokal yang berbeda satu sama lain.

Keragaman tersebut merupakan salah satu keunikan wisata yang dimiliki oleh Indonesia untuk dapat mendorong daya tarik kunjungan wisatawan, keindahan dan nilai keanekaragaman kekayaan budaya bangsa dan dapat dikemas menjadi destinasi yang memiliki nilai jual tinggi.

Pemerintah telah menetapkan target pembangunan pariwisata nasional demi mewujudkan Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.



Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa dan dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan bernilai ekonomi tinggi

INDIKATOR KEBERHASILAN

Jumlah pengembangan destinasi wisata dan jumlah kunjungan wisatawan yang merata di seluruh pulau dan provinsi

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2014-2019) target kunjungan wisatawan ke Indonesia mencapai 20 juta wisatawan mancanegara (Wisman) pada tahun 2019. Target pemerintah ini didasarkan pada tren pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara selama tahun 2014 mencapai 9,44 juta kunjungan, naik 7,19 persen. pertumbuhan jumlah angka kunjungan wisatawan naik melampaui target pertumbuhan pariwisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 5 persen.

Tabel 9. Kunjungan Wisatawan 2010-2014

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara
2010	7.000.000	234.377
2011	7.600.000	236.752
2012	8.000.000	245.290
2013	8.800.000	250.036
2014	9.440.000	251.200

Sumber: LKKP Kementerian Pariwisata 2014

Kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2014 mencapai 9,4 juta wisatawan, tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama di tahun 2013 yakni 8.8 juta wisatawan. Sementara wisatawan domestik pada periode tahun 2014 mencapai 250 juta. Menurut data UNWTO pada tahun yang sama jumlah wisatawan dunia pada 2014 sebanyak 1,14 miliar sedangkan yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 9,43 juta wisman. Jumlah wisatawan mancanegara tersebut pada periode 2014, kunjungan terbesar berasal dari Singapura yaitu 1.52 juta wisman, Malaysia 1.28 juta wisman, Australia 1.10 juta wisman, Tiongkok 960 ribu wisman dan Jepang 487 ribu wisman.

—BPS dan UNWTO, 2014

Jenis pariwisata yang akan diandalkan dalam promosi ke Wisman mencakup:

1. Wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan.
2. Wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa.
3. Wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu.

—Pembangunan Pariwisata 2015-2019, Kementerian PPN/Bappenas, 2014

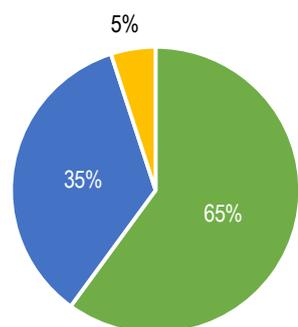
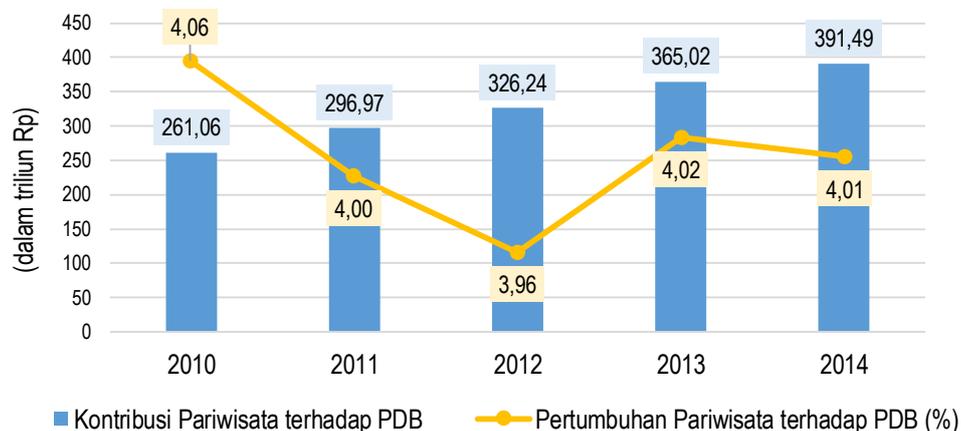
Untuk mencapai keberhasilan visi pariwisata berbasis kebudayaan lokal sebagai pilar pembangunan masa depan. Pengembangan dan penggalian potensi objek daya tarik wisata baik destinasi yang telah ada maupun yang baru melalui strategi perbaikan citra pariwisata dan revitalisasi produk pariwisata Indonesia. Hal lain yang harus dilakukan menjalin pola kemitraan dan kerjasama antara pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dengan sektor swasta secara sinergis dan berkelanjutan.

Kontribusi maksimal sektor pariwisata pada PDB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB terus mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, Kementerian Pariwisata mencatat pada tahun 2010 kontribusi sektor pariwisata menyumbang terhadap PDB nasional sebesar 261,06 triliun dan meningkat pada tahun 2014 menjadi 391,49 triliun. Namun jika dilihat dari sisi pertumbuhan, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB relatif stagnan di angka 4%. Dalam 5 tahun terakhir dicatat pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDB tertinggi tercatat pada tahun 2010 mencapai 4,06%.

Grafik 12. Kontribusi Pariwisata terhadap PDB

Sumber: LKKP Kementerian Pariwisata 2014



Grafik 13. Potensi Kekuatan Pariwisata Indonesia

Sumber: Kementerian Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional sangat mungkin untuk ditingkatkan mengingat potensi yang dimiliki oleh Indonesia di sektor pariwisata sangat beragam. Mulai dari daya tarik keindahan alam Indonesia (*nature*), keanekaragaman budaya dan keramahan masyarakat Indonesia (*culture*) sampai wisata olahraga dan wisata kawasan terpadu (*manmade*). Melalui penggalian potensi, *branding* dan promosi pariwisata yang kuat maka pariwisata di Indonesia akan menjadi salah satu penyumbang PDB terbesar.

Serapan tenaga kerja pada sektor pariwisata

Salah satu indikator penting untuk mengukur maju dan berkembangnya industri pariwisata di Indonesia adalah dengan melihat angka serapan tenaga kerja yang bekerja pada sektor pariwisata. Menurut Data Neraca Satelit Pariwisata Nasional (NESPARNAS 2011-2013), kontribusi sektor pariwisata terhadap serapan tenaga kerja secara nasional pertahun 2013 hanya mencapai 8,52 persen atau 9,61 juta jiwa dari 112,76 juta jiwa tenaga kerja nasional.

Tahun	Kontribusi terhadap Tenaga Kerja		
	Tenaga kerja Pariwisata (Juta)	Tenaga kerja Nasional (Juta)	Kontribusi Pariwisata (%)
2010	7,44	108,21	6,87
2011	8,53	109,95	7,75
2012	9,35	110,81	8,46
2013	9,61	112,76	8,52

Tabel 10. Kontribusi Tenaga kerja Sektor Pariwisata terhadap Tenaga kerja Nasional 2010-2013

Sumber: (NESPARNAS 2011 – 2013)

Masih rendahnya serapan tenaga kerja dari sektor pariwisata terhadap tenaga kerja nasional disebabkan salah satunya oleh faktor rendahnya kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia yang bekerja di sektor pariwisata. Untuk itu, peningkatan profesionalisme dan daya saing SDM pariwisata dengan peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan dan lulusan lembaga pendidikan tinggi pariwisata menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan serapan tenaga kerja di sektor pariwisata.

Upaya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata.

KONDISI PEMUNGKIN

Kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata yang konsisten

Kebijakan nasional pembangunan sektor pariwisata menyebutkan bahwa pengembangan pariwisata yang maju dan dapat diandalkan sebagai sektor yang mampu berkontribusi secara maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, didasarkan pada pertimbangan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang harus dikelola secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya dan norma yang hidup dalam masyarakat, terjaganya kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Pemerintah telah mengeluarkan paket rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan diikuti juga penyusunan rencana induk kepariwisataan daerah pada tingkat pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Rencana induk yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS 2010 – 2025) bertujuan untuk memberikan arahan pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu 2010 - 2025 yang meliputi pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), Pemasaran Pariwisata Nasional, Industri pariwisata nasional dan Kelembagaan Kepariwisata Nasional.

Pengembangan pariwisata yang maju dan dapat diandalkan didasarkan pada pertimbangan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang harus dikelola secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pengembangan ekosistem pariwisata, tidak hanya pengembangan destinasi wisata

Sejalan dengan rencana pembangunan nasional yang berkelanjutan dan serta mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan dalam rangka mitigasi perubahan iklim, pengembangan sektor kepariwisataan harus diarahkan pada paradigma pengembangan ekowisata (*eco-tourism*) sebagai konsep

Pengembangan dan penggalian potensi budaya lokal dengan beragam jenis kearifan lokal yang dimiliki perlu mendapatkan tempat dalam pengembangan kepariwisataan di Indonesia.

pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pengembangan ekowisata mendukung upaya pelestarian lingkungan alam dan budaya serta meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya. Konsep ekowisata diharapkan mampu menjamin pembagian manfaat ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah setempat serta dapat menjaga kelestarian lingkungan.

Penggalian, pengembangan, dokumentasi dan pelestarian budaya lokal

Salah satu aspek penting destinasi wisata di Indonesia adalah keragaman budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat, yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Pengembangan dan penggalian potensi budaya lokal dengan beragam jenis kearifan lokal yang dimiliki akan menjadi nilai tambah bagi pengembangan kepariwisataan di Indonesia.

Kesiapan budaya masyarakat dan iklim investasi dalam mendukung pariwisata

Pengembangan destinasi pariwisata, terutama pengembangan tempat tujuan wisata baru di Indonesia membutuhkan kesiapan dari masyarakat setempat serta dukungan investasi agar pariwisata dapat dikembangkan sebagai industri penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Tak jarang pariwisata dianggap sebagai ancaman bagi kelestarian budaya lokal, dan sering kali inisiatif pemerintah daerah dalam membuka destinasi baru tidak disertai kesiapan dan dukungan masyarakat setempat atas potensi kunjungan wisatawan.

Pada sisi lain, pemerintah daerah juga perlu mendorong terbangunnya iklim investasi yang kondusif bagi industri dan usaha kecil menengah yang bergerak di sektor pariwisata. Perangkat aturan, kebijakan, perizinan, keamanan dan infrastruktur menjadi faktor pendorong berkembangnya investasi di bidang pariwisata.

Sebagai sebuah industri, pariwisata membutuhkan iklim investasi yang dapat menjamin investasi tersebut bisa berkembang.

PERIODE TURBULENSI 2015 – 2020

Pengembangan destinasi wisata (DPN dan KSPN) beserta infrastruktur/fasilitas pendukungnya

Ketersediaan infrastruktur merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata di Indonesia. Sarana infrastruktur pendukung pariwisata menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) di Indonesia.

Infrastruktur kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional masih banyak yang kurang memadai. Akibat rendahnya kualitas infrastruktur membuat tingginya biaya kunjungan pariwisata.

Ketersediaan infrastruktur yang baik mutlak harus dimiliki daerah-daerah tujuan wisata guna mendukung kebijakan pemerintah pusat dimana sektor pariwisata menjadi *leading sector* dalam mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu pengembangan infrastruktur beserta fasilitas penunjang pariwisata di suatu kawasan wisata akan sangat menunjang kegiatan pariwisata, sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti akses jalan, transportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sarana wisata lainnya yang meliputi sarana akomodasi, penginapan dan rumah makan dan lainnya.

Gambar 4. Sebaran Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dalam Destinasi Pariwisata Nasional

Sumber: Kementerian Perhubungan, 2015



Konsistensi pencitraan dan promosi wisata dan budaya Indonesia

Mengingat pentingnya sektor pariwisata dalam pembangunan nasional, Indonesia telah melakukan promo wisata melalui *branding* 'Wonderful Indonesia' dan 'Pesona Indonesia' untuk memperkuat pencitraan potensi wisata Indonesia di dalam maupun ke luar negeri.

Di masa mendatang, Indonesia harus membangun citra pariwisata secara konsisten pada skala nasional, namun juga menumbuhkan citra unik unggulan untuk beberapa kawasan strategis pariwisata, yang dikelola secara sinergis dan bukan menjadi bagian yang terpisah dari kampanye wisata nasional.

Perbaiki kualitas layanan wisata

Perbaiki kualitas layanan pariwisata harus didasarkan pada kualitas sumber daya manusia pelaku di sektor pariwisata, selain pada sistem dan tata kelola kepariwisataan itu sendiri. Ketersediaan lembaga pendidikan dan keterampilan untuk memenuhi standar kompetensi tenaga kerja pada sektor pariwisata harus menjadi prioritas. Hingga kini tercatat beberapa lembaga pendidikan kepariwisataan di beberapa kota besar serta terdapat universitas negeri dan swasta yang menyelenggarakan program pariwisata termasuk program pasca sarjana.

Tantangan masa depan bagi memenuhi kuantitas dan kualitas serta standar kompetensi tenaga kerja di sektor pariwisata adalah mendorong pemerataan pendidikan dan keterampilan tidak hanya terkonsentrasi di Jawa dan Bali tapi juga di daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata yang tinggi.

PERIODE TRANSFORMASI 2020 – 2050

Pengelolaan wisata berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan didefinisikan sebagai pariwisata yang memperhitungkan penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat.

— UNEP, UNWTO, 2005

Pengelolaan pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mampu memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan baik sekarang maupun yang akan datang. Dampak pengembangan pariwisata diharapkan memberikan pengaruh yang positif dari sisi sosial budaya dan lingkungan. Dampak negatif pariwisata seperti eksploitasi ekosistem secara berlebihan, konsumsi energi dan air yang berlebihan, produksi sampah yang besar, serta terdegradasinya nilai-nilai sosial dan budaya komunitas harus dicegah semaksimal mungkin. Sektor pariwisata harus menangani permasalahan lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh kegiatan pariwisata secara bijaksana. Kerangka investasi yang sistematis dan tindakan pencegahan yang tepat diperlukan untuk menunjang upaya perlindungan lingkungan, sosial dan keberlanjutan budaya sembari membangun sektor ekonomi yang berdaya saing kuat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup dari sektor pariwisata

Diharapkan sektor pariwisata dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat atau komunitas di daerah tujuan wisata.

Salah satu tujuan utama pembangunan sektor pariwisata adalah kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran pembangunan, yang berpihak pada masyarakat miskin, pertumbuhan, penciptaan pekerjaan dan pelestarian lingkungan. Sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat atau komunitas di daerah tujuan wisata.

Dukungan bagi pengembangan jenis usaha kelompok masyarakat/komunitas harus terus dilakukan bersamaan dengan penguatan dan pemberdayaan masyarakat adat. Unit usaha masyarakat harus dibantu untuk menemukan ide kreatif, menyusun rencana bisnis dan mengakses pasar serta modal. Pengembangan mata pencaharian masyarakat yang berbasis budaya dan pariwisata perlu dilakukan melalui pendampingan dan pembinaan, pemberian akses permodalan, pengembangan sentra kesenian daerah, termasuk pengembangan atau penguatan kelembagaan pengelola seni dan budaya daerah.

Pengembangan industri seni dan kreatif secara optimal

Kegiatan pengemasan kegiatan tradisional menjadi industri kreatif akan memiliki nilai tambah dari sisi estetika dan promosi sehingga dapat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung

Pengembangan destinasi wisata harus ditopang dengan revitalisasi kesenian masyarakat. Jenis-jenis kesenian tradisional dapat dikemas menjadi sebuah industri kreatif yang memiliki nilai jual yang tinggi.

Untuk itu, yang harus dilakukan dalam pengembangan industri seni kreatif secara maksimal yaitu dengan cara meningkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas orang kreatif lokal dengan didukung oleh kelembagaan pendidikan yang berkualitas, dukungan pembiayaan bagi pengembangan industri kreatif dan serta dukungan infrastruktur dan teknologi yang dapat menunjang industri kreatif menjadi industri yang kompetitif.

VISI ELEMEN

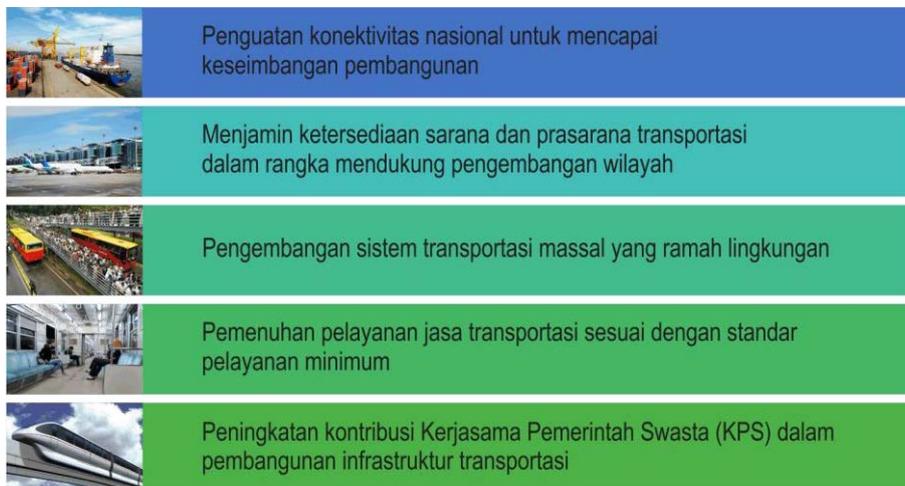
Jaringan transportasi darat, laut dan udara yang menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan

Sistem transportasi jelas merupakan bagian penting dan strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sektor transportasi berfungsi untuk menyediakan angkutan bagi arus pergerakan orang, barang dan jasa baik di tingkat lokal, regional maupun internasional.

Sebagai negara kepulauan, dengan karakteristik geografis dan demografis yang tersebar dan beragam, pembangunan jaringan sistem transportasi nasional harus mengintegrasikan pendekatan transportasi intermoda, di mana jaringan transportasi darat, laut dan udara mendapatkan prioritas yang sama dalam agenda pembangunan dan diselenggarakan secara terpadu, efisien, handal dan berkualitas. Pembangunan transportasi nasional pun harus diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah di Indonesia.



pembangunan transportasi berfungsi untuk menyediakan jasa pelayanan angkutan bagi arus pergerakan orang, barang, dan jasa baik di tingkat lokal, regional maupun internasional



Gambar 5. Isu Strategis Pembangunan Infrastruktur Transportasi

Sumber: Program Kegiatan Strategis Kementerian Perhubungan, 2015

INDIKATOR KEBERHASILAN

Tingkat konektivitas pembangunan yang tinggi

Rendahnya tingkat konektivitas transportasi dan sistem logistik dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan hal tersebut menyulitkan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia. Karena itu, untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan, pemerintah telah menyusun rencana konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (*locally integrated and globally connected*).

Terintegrasi Secara Lokal (Locally Integrated), diartikan bahwa pada tahun 2025 seluruh aktivitas logistik di Indonesia mulai dari tingkat pedesaan, perkotaan, sampai dengan antar wilayah dan antar pulau beroperasi secara efektif dan efisien dan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi secara nasional dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Terhubung Secara Global (Globally Connected) diartikan bahwa pada tahun 2025, Sistem Logistik Nasional akan terhubung dengan system logistik regional (ASEAN) dan global melalui Pelabuhan Hub Internasional (termasuk fasilitas kepabeanan dan fasilitas perdagangan) dan jaringan informasi “International Gateways”, dan jaringan keuangan agar pelaku dan penyedia jasa logistik nasional dapat bersaing di pasar global.

—Lampiran Perpres No. 26 Tahun 2012 Tentang Sislognas

Dengan rencana tersebut diharapkan simpul-simpul transportasi seperti pelabuhan, terminal, stasiun, depo, pusat distribusi, kawasan pergudangan dan bandar udara dapat saling terintegrasi secara terpadu, efektif dan efisien. Jaringan komunikasi dan informasi juga perlu diintegrasikan untuk mendukung kelancaran arus informasi terutama untuk kegiatan perdagangan, keuangan dan kegiatan perekonomian lainnya berbasis elektronik.

Kontribusi maksimal sektor transportasi pada PDB

Kontribusi sektor transportasi terhadap PDB nasional telah tumbuh secara bertahap, data statistik menunjukkan rata-rata pertumbuhan kontribusi sektor transportasi terhadap PDB Nasional dalam 5 tahun terakhir 2010-2014 mencapai 7,18%. Sumbangan tersebut bersumber dari sektor pengangkutan yang terdiri dari angkutan rel, jalan raya, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyebrangan, angkutan udara serta jasa penunjang angkutan. Kontribusi transportasi terhadap PDB dapat dimaksimalkan dengan melakukan penambahan dan pemodernisasian jenis-jenis moda transportasi massal.

Transportasi/tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Pengangkutan	85.293,4	91.846,8	97.878,8	104.787,7	112.570,7
1. Angkutan Rel	832,0	798,8	745,5	765,7	926,5
2. Angkutan Jalan raya	35.974,4	38.339,3	41.071,0	44.282,6	47.705,9
3. Angkutan laut	8.864,6	9.157,2	9.547,9	10.128,9	10.832,6
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyebrangan	2.964,2	3.083,5	3.288,9	3.518,1	3.758,2
5. Angkutan Udara	17.330,4	19.815,7	21.460,7	22.701,3	24.237,8
6. Jasa Penunjang Angkutan	19.327,8	20.652,3	21.764,8	23.391,1	25.109,7

Tabel 11. Kontribusi Sektor Transportasi (Pengangkutan) terhadap PDB Nasional 2010-2014 (Miliar Rupiah)

Sumber: BPS pada Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2000-2014

KONDISI PEMUNGKIN

Sistem aturan yang mendukung strategi pembangunan sektor transportasi nasional

Dalam konteks pembangunan nasional, transportasi dapat dipandang sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan politik. Peningkatan investasi terhadap pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia diharapkan mendapat dukungan lebih pada ruang fiskal dalam APBN, termasuk dukungan oleh sistem dan aturan yang dapat mempercepat tumbuhnya transportasi nasional (Tatranas), wilayah (Tatrawil) dan lokal (Tatralok).

Kondisi atau prasyarat yang dibutuhkan dalam konteks pengembangan percepatan pertumbuhan transportasi adalah kebijakan dan program yang berkaitan dengan pelayanan transportasi nasional; keselamatan dan keamanan transportasi; pembinaan perusahaan transportasi; kualitas SDM dan iptek; kualitas lingkungan hidup dan penghematan energi; penyediaan dana pembangunan transportasi; dan penyelenggaraan administrasi negara di sektor transportasi.

Dalam konteks pembangunan nasional, transportasi dapat dipandang sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan politik.

Insentif bagi investasi swasta yang mendorong keterlibatan swasta pada pembangunan sektor transportasi

Kebutuhan pembiayaan operasional dan pembangunan (investasi) di sektor transportasi sangat tinggi. Dalam dokumen RPJMN 2010-2014 menyebutkan bahwa kebutuhan pembiayaan operasional dan pembangunan (investasi) di sektor transportasi di luar jalan selama kurun waktu 5 tahun rata-rata sebesar Rp. 325,26 triliun per tahun, dengan alokasi sumber pendanaan dari: APBN (rupiah murni dan pinjaman luar negeri) rata-rata sebesar Rp. 30,67 triliun pertahun, investasi BUMN rata-rata sebesar Rp. 2,681 triliun pertahun, sehingga gap pembiayaan sebesar rata-rata sebesar Rp. 291,91 triliun pertahun diharapkan dapat diperoleh melalui investasi swasta.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dapat diperkuat dengan pemberian insentif yang memadai bagi investasi swasta dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur transportasi. Pemerintah dapat memberikan jaminan terhadap kemudahan perijinan dan serta insentif pajak bagi swasta dalam skema proyek KPS.

Tabel 12. Investasi dan Pembiayaan Transportasi 2015-2019

Sumber : Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative

KEBUTUHAN	DETAIL KEBUTUHAN	BIAYA (USD)
PERKERETAAPIAN		18.677.400.000
Sarana kereta api	Lokomotif 1334 unit, kereta 7767 unit, gerbong 11016 unit, kereta perkotaan 1673 unit	9.216.400.000
Prasarana jalan rel KA	Jalan Rel Antar Kota 2.306 km dan Jalan Rel Perkotaan 1.056 km	9.461.000.000
TRANSPORTASI LAUT		31.990.462.500
Prasarana pelabuhan	Terminal (peti kemas, CPO, minyak bumi, batubara, curah lainnya, lainnya), CDC/multi moda, pesiar/pariwisata, lahan/infra dasar	12.391.000.000
Sarana kapal	Kapal kontainer 391 unit, tanker 467 unit, general cargo 1790 unit, penumpang 785 unit, tongkang 3163 unit, tug boat 2969 unit	19.599.462.500
TRANSPORTASI UDARA		22.467.352.910
Prasarana bandara	Bandara baru di 64 lokasi (code number 1-4) dan peningkatan bandara di 87 lokasi	3.832.352.910
Sarana pesawat	Pesawat kapasitas > 100 seat = 225 unit, dan kapasitas < 100 seat = 88 unit	18.635.000.000
TRANSPORTASI PENYEBERANGAN		186.000.000
Pelabuhan baru		106.250.000
Kapal penyeberangan		79.750.000
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN		5.925.916.600
Prasarana Lalu Lintas Jalan		118.750.000
Sarana Lalu Lintas Jalan		205.833.300
Transportasi Perkotaan (BRT (IOM) dan sistem pendukungnya)		5.601.333.300
TOTAL (USD)		79.247.132.010
TOTAL (Rupiah, Kurs 1 USD = Rp. 10500)		Rp. 832 Triliun

PERIODE TURBULENSI 2015 – 2020

Percepatan pembangunan (penambahan/perbaikan) infrastruktur jaringan transportasi modern, multimoda dan saling terhubung

Skenario percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dilakukan dalam kerangka penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan wilayah dan pemerataan pembangunan nasional.

Selain itu juga dilakukan upaya peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur transportasi, percepatan pembangunan sistem transportasi multimoda dengan prioritas pada pembangunan infrastruktur transportasi angkutan laut dan pembangunan infrastruktur transportasi di daerah terluar, terdalam dan perbatasan. Strategi tersebut juga bertujuan untuk mendukung sistem distribusi logistik nasional, mendukung konektivitas sektor industri dan pariwisata, dan menguatkan sistem pertahanan nasional.

Infrastruktur transportasi yang harus dibangun meliputi pelabuhan laut, bandar udara, stasiun kereta, terminal bus dan lainnya yang mencakup rute dan trayek yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Penyiapan armada milik pemerintah maupun swasta yang memadai secara jumlah maupun standar kualitas juga perlu segera dilakukan beriringan dengan penambahan jaringan infrastruktur transportasi.



Gambar 6. Skenario Pembangunan Infrastruktur Transportasi

Sumber: Kementerian Perhubungan, 2015

Perbaikan sistem dan perbaikan teknologi pengelolaan transportasi dan perhubungan

Optimalisasi sarana transportasi membutuhkan pembenahan sistem dan perbaikan teknologi pengelolaan transportasi dan perhubungan.

Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang holistik dan berkelanjutan. Pembangunan dan perbaikan sistem serta sarana transportasi diarahkan pada transformasi jangka panjang. Tata kelola jalan, pembatasan volume kendaraan pribadi, perbaikan sarana transportasi umum dan mendorong sistem transportasi nasional yang lebih ramah lingkungan.

Sektor swasta dapat berkontribusi melalui skema kerjasama yang ditawarkan oleh pemerintah (KPS) untuk berinvestasi dalam upaya pengembangan infrastruktur penunjang transportasi dan perhubungan nasional.

Skenario percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dilakukan melalui penguatan konektivitas nasional, menjamin ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, pengembangan sistem transportasi massal dan pemenuhan pelayanan jasa transportasi.

Transportasi berkelanjutan (*sustainable transportation*), adalah suatu transportasi yang tidak menimbulkan dampak yang membahayakan kesehatan masyarakat atau ekosistem dan dapat memenuhi kebutuhan mobilitas yang ada secara konsisten dengan memperhatikan (a) penggunaan sumberdaya terbarukan pada tingkat yang lebih rendah dari tingkat regenerasinya dan (b) penggunaan sumber daya tidak terbarukan pada tingkat yang lebih rendah dari tingkat pengembangan sumberdaya alternatif yang terbarukan.

—OECD, 1994

PERIODE TRANSFORMASI 2020 – 2050

Efisiensi dan modernisasi transportasi yang berkelanjutan

Dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, murah dan ramah lingkungan, dibutuhkan pengembangan model transportasi yang berkelanjutan, yang merupakan model transportasi yang aman, manusiawi, efisien dan memberikan keadilan energi bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Modernisasi alat dan fasilitas transportasi akan mendorong efisiensi penggunaan energi dan penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pengembangan transportasi massal perkotaan yang ramah lingkungan

Ketimpangan antara besarnya kebutuhan penduduk akan sistem dan layanan transportasi yang efisien dan terbatasnya moda transportasi massal yang ramah lingkungan, merupakan masalah utama yang dihadapi oleh seluruh kota-kota besar di Indonesia. Diperlukan strategi pengembangan sistem dan layanan transportasi publik yang aman dan ramah lingkungan, yang juga harus dilengkapi dengan strategi kampanye pergeseran budaya masyarakat kota besar dalam bertransportasi.

Pergeseran pola perilaku masyarakat dengan adanya angkutan massal yang ramah lingkungan dapat dimaknai sebagai suatu perubahan yang cukup berarti dalam pemilihan moda transportasi oleh masyarakat.

VISI ELEMEN

Infrastruktur yang menopang, melejitkan dan pemeratakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Infrastruktur merupakan syarat dan pondasi utama pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa. Pengembangan dan penyiapan infrastruktur akan memacu pembangunan sektor lainnya. Peran penting pembangunan infrastruktur jelas tercakup pada strategi elemen-elemen sebelumnya dalam dokumen ini, terutama pada elemen pembangunan manusia, ekonomi, kelautan, pertanian, energi dan kelistrikan, pariwisata dan keragaman budaya, serta transportasi dan konektivitas.

Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu syarat utama pencapaian target dan pelaksanaan strategi ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur memiliki efek domino yang dapat menggerakkan berkembangnya investasi dan penyerapan lapangan kerja pada saat yang sama.

Komitmen dan keterlibatan semua pemangku kepentingan akan memacu berbagai pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah dan di semua sektor, yang diharapkan menjadi pengungkit Bergeraknya sektor ekonomi produktif, menurunkan kesenjangan ekonomi antar wilayah, pemeratakan manfaat pembangunan dan menjadi landasan pacu bagi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.



Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu syarat utama pencapaian target dan pelaksanaan strategi ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur memiliki efek domino yang dapat menggerakkan berkembangnya investasi dan penyerapan lapangan kerja pada saat yang sama

INDIKATOR KEBERHASILAN

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi secara signifikan

Berbagai prediksi menyatakan bahwa Indonesia di masa depan akan menjadi negara dengan pendapatan ekonomi tinggi, seperti prediksi yang dikeluarkan PricewaterhouseCoopers dalam kajiannya yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2030 menempati urutan ke-11 dunia, bahkan pada tahun 2050 Indonesia diperkirakan menempati urutan ke-8 ekonomi dunia.

Segenap prediksi tersebut hanya mungkin benar-benar terjadi jika didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur utama penunjang pembangunan nasional. Jika tidak, maka laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan hanya akan semata ditopang oleh pertumbuhan konsumsi kelas menengah yang terpusat di beberapa wilayah.

Pada tahun 2030, perekonomian Indonesia menempati urutan ke-11 ekonomi terbesar dunia dan bahkan pada tahun 2050 Indonesia diperkirakan menempati urutan ke-8 ekonomi dunia

— PricewaterhouseCoopers, 2013

Mendorong pertumbuhan ekonomi merupakan upaya strategis yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang merata proporsional

Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melaju pada skala nasional, namun pertumbuhan tersebut juga meninggalkan berbagai persoalan yang mendesak untuk diselesaikan, diantaranya tidak merata dan proporsionalnya pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah atau masih terdapat disparitas atau ketimpangan pembagian manfaat pembangunan di berbagai daerah di Indonesia.

Data menunjukan bahwa peran wilayah/pulau dalam pembentukan PDB masih relatif kecil atau bahkan tidak ada perubahan (stagnan). Pertumbuhan PDB sampai saat ini ditopang oleh dominasi Pulau Jawa dan Sumatera. Kisaran sumbangan kedua pulau tersebut terhadap PDB mencapai 80-82%.

Pulau	1982	1987	1992	1997	2002	2007	2012	2013
Jawa dan Sumatera	80,3	82,7	82,1	81,6	82,2	81,8	81,4	81,8
Kalimantan dan Sulawesi	14,5	12,6	12,8	13,1	13,0	13,4	14,0	13,5
Bali dan Nusa Tenggara	2,9	3,0	3,1	3,2	2,9	2,7	2,5	2,5
Maluku dan Papua	2,3	1,7	2,0	2,1	1,9	2,1	2,1	2,2
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 13. Peran Wilayah/Pulau dalam Pembentukann PDB Nasional 1982-2013

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2014

Untuk itu, percepat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, melalui percepatan pembangunan klaster-klaster industri. Investasi pemerintah dan swasta perlu dioptimalkan bagi pembangunan klaster-klaster industri di wilayah tersebut untuk memicu dampak pengganda (*multiplier effect*) pada daerah sekitar, khususnya di daerah tertinggal. Dengan demikian diharapkan dapat berperan dan kontribusi daerah dalam mendorong laju pembangunan nasional yang lebih dioptimalkan.

KONDISI PEMUNGKIN

Kebijakan tata ruang yang berbasis ekosistem dan mendukung arah pembangunan nasional

Pembangunan infrastruktur semestinya dapat dilakukan dengan cara-cara yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Rencana pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi di daerah harus disusun dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan ekosistem dan lingkungan sekitarnya.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang komprehensif, terpadu dan berkeadilan

Rencana pembangunan nasional jangka panjang mengamankan terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Dalam pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang komprehensif, terpadu dan memberikan keadilan merupakan asas yang harus dijunjung.

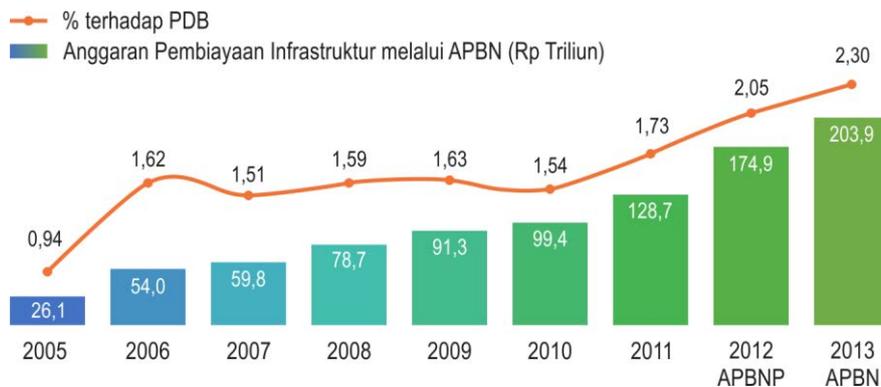
Keterpaduan menjamin keutuhan pengembangan infrastruktur pusat-daerah-antar wilayah, darat-laut-udara dan lintas sektoral. Sedangkan fokus pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan akan menjamin pemerataan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Iklim investasi yang kondusif, dukungan kebijakan dan insentif serta alokasi APBN yang memadai

Belanja pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur terus mengalami peningkatan. Namun disadari bahwa pemerintah tidak mungkin mampu memenuhi semua kebutuhan infrastruktur penunjang pembangunan nasional. Keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, dan juga kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat seyogyanya akan menjadi dukungan yang vital bagi percepatan pengembangan infrastruktur utama penunjang pembangunan. Iklim investasi yang kondusif dan dukungan kebijakan yang memadai dibutuhkan bagi penggalangan peran dan keterlibatan sektor swasta.

Dalam pembangunan infrastruktur, rencana jangka panjang pembangunan nasional mengamankan agar terwujud pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah sudah seharusnya menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor yang akan berinvestasi di bidang infrastruktur.



Grafik 13. Pembiayaan Infrastruktur melalui APBN (2005-2014)

Sumber: World Bank dan Index Mundi, 2014

PERIODE TURBULENSI 2015 – 2020

Percepatan pembangunan infrastruktur utama pendukung pertumbuhan ekonomi

Dalam RPJMN (2004-2025), pemerintah telah mencanangkan target pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Cita-cita tersebut diikuti oleh target untuk meningkatkan

Sektor Capaian per 2019:
 Jalan raya = 67%,
 Perkeretaapian = 80%,
 Transportasi perkotaan = 69%,
 Transportasi laut = 75%,
 Feri dan ASDP = 88%,
 Transportasi udara = 91%,
 Ketenagalistrikan = 100%,
 Energi dan gas = 79%,
 Sumber daya air = 77%,
 Air bersih dan sanitasi = 100%,
 Perumahan rakyat = 100%,
 Teknologi komunikasi dan Informatika = 83%,
 Total = (Rp) 5452 T.

—APINDO, 2014

pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2025 dengan PDB perkapita mencapai > USD 12.000.

Target yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut akan dapat dicapai jika ada prasyarat yang mendukung seperti percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur pendukung: infrastruktur pengelolaan sumber daya air, perumahan, layanan pendidikan, kesehatan dan keagamaan, layanan pos dan perbankan, jaringan telekomunikasi, dll.

Dalam skema pembangunan infrastruktur pemerintah harus menetapkan skala prioritas pembangunan untuk memberikan efek meluas sehingga dapat berkontribusi maksimal terhadap laju pertumbuhan ekonomi agregat dalam skala nasional.

Dalam rencana pembangunan nasional, beberapa target pembangunan nasional yang ingin dicapai adalah pembangunan jalan raya, perkeretaapian, transportasi perkotaan, transportasi laut, feri dan ASDP, transportasi udara, ketenagalistrikan, energi dan gas, sumber daya air, air bersih dan sanitasi, perumahan rakyat, teknologi komunikasi dan informatika.

Keterlibatan swasta melalui *Public Private Partnership (PPP)* atau dapat membantu belanja APBN untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur.

Pada dasarnya kerjasama pemerintah dan swasta terkait dengan kerjasama pengadaan investasi. Secara konvensional kerjasama dalam bentuk kontrak layanan (*service contract*) yang hampir seluruhnya adalah investasi publik dari pemerintah, kemudian perlu pengembangan yang lebih banyak peranan investasi dari pihak swasta mulai dari kontrak operasi dan pemeliharaan (O&M Contract), BLT (Leasing), BOT/ROOT, BOOT (DBFO)/ROOT, BOO/ROO, sampai dengan semua investasi dari swasta dalam bentuk *privatization/ divestiture*.

PERIODE TRANSFORMASI 2020 – 2050

Peningkatan investasi dan peran serta swasta dalam pembangunan infrastruktur

Skema investasi sektor swasta merupakan komponen vital dalam pembangunan infrastruktur. Investasi swasta melalui *Public Private Partnership (PPP)* dapat menjadi sumber energi sandingan bagi anggaran belanja pemerintah pusat maupun daerah untuk memenuhi target-target pembangunan infrastruktur.

Karena itu, dibutuhkan komitmen pemerintah dalam penyempurnaan kebijakan, peraturan perundangan, kelembagaan, serta pengaturan pengelolaan risiko dalam proyek kerjasama antara pemerintah dan swasta.



- Keterangan:**
 O&M Contract : Operation and Maintenance
 BLT (Leasing) : Build and Transfer
 BOT : Build Operate Transfer
 ROT : Rehabilitate Operate Transfer
 BOOT : Build Own Operate Transfer
 DBFO : Develop Build Finance Operate
 BOO : Build Own Operate
 ROO : Rehabilitate Operate Own

Gambar 7. Model Kerjasama Pemerintah-Swasta

Sumber: Dir. Peng. Kerjasama Pemerintah-Swasta, Bappenas

Pembangunan infrastruktur desa dan daerah tertinggal

Berdasarkan undang-undang tentang desa terbaru, desa mempunyai sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk mendanai pembangunan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab desa, yang salah satunya mencakup pembangunan infrastruktur.

Dana desa yang akan diterima oleh desa harus dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur baik itu jalan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pasar desa di daerah pedesaan sehingga dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi desa, antar desa dan daerah tertinggal.

Perbaikan kebijakan tata ruang dan pertanahan pada tingkat nasional, pulau dan daerah

Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan sosial dimaksudkan untuk memberikan panduan secara terperinci mengenai penilaian kelayakan lingkungan dan kelayakan sosial berikut meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari setiap rencana pembangunan Infrastruktur.

Perbaikan kebijakan yang terkait dengan tata ruang dan pertanahan baik tingkat nasional, pulau maupun daerah yang mengarah pada pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan harus diwujudkan untuk menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan.

Diharapkan hasil pembangunan infrastruktur dapat bermanfaat bagi masyarakat luas melalui kerjasama antara pusat dan daerah yang berbasis keterpaduan dan pengembangan wilayah.



Gambar 8. Target Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Sumber: Kementerian PU dan diolah dari berbagai sumber

VISI ELEMEN

Pemanfaatan sumber daya dengan bijaksana, nirsampah dan berwawasan lingkungan

Aktivitas pembangunan yang pesat di satu sisi memberikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yang pada umumnya akan diiringi dengan laju industrialisasi dan laju pertumbuhan penduduk yang pasti juga akan berimplikasi pada terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Perilaku produksi, perilaku konsumsi dan gaya hidup yang tidak lestari telah memberikan sumbangan signifikan bagi terciptanya kerusakan lingkungan dan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dengan bijaksana dan berwawasan lingkungan harus didorong menjadi arus utama (*mainstream*) dalam sistem pembangunan nasional, sehingga sumber daya alam yang terbatas dan lingkungan yang semakin rentan tetap dapat memberikan kehidupan yang layak bagi penduduk Indonesia dengan pertumbuhan populasinya yang kian tahun terus mengalami peningkatan.



Perilaku produksi, perilaku konsumsi dan gaya hidup yang tidak lestari telah memberikan sumbangan signifikan bagi terciptanya kerusakan lingkungan dan sumber daya alam

Sebagai paradigma baru dalam pembangunan, ekonomi hijau dapat dilihat sebagai paradigma yang dapat mendorong pertumbuhan pendapatan dan lapangan kerja, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan diharapkan mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

INDIKATOR KEBERHASILAN

Penurunan kerusakan lingkungan hidup dan penurunan emisi karbon dampak pembangunan ekonomi

Perbaikan pola pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam diharapkan mampu menurunkan risiko kerusakan lingkungan secara maksimal sembari melakukan perbaikan/rehabilitasi/restorasi ekosistem yang sudah rusak serta menurunkan emisi karbon sembari berusaha mendorong kenaikan simpanan karbon.

Pelaku pembangunan harus sungguh-sungguh memahami bahwa lingkungan memiliki jasa-jasa ekosistem yang menopang kehidupan manusia selama ini. Berkurangnya resiliensi ekosistem akan berakibat pada berkurangnya ketahanan ekosistem dalam menjaga keseimbangan daya lingkungan dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Ekonomi hijau merupakan opsi konsep pembangunan baru yang dapat mendorong pertumbuhan pendapatan dan lapangan kerja, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan menciptakan keseimbangan tiga pilar pembangunan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

Klasifikasi Jasa Ekosistem Berdasarkan Fungsinya

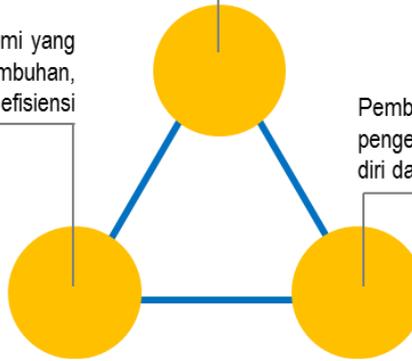
- **Jasa Penyediaan** (*provisioning services*): sumber bahan makanan, obat-obatan alamiah, sumber daya genetik (*genetic resources*), kayu bakar, serat, air, mineral, dll.
- **Jasa Pengaturan** (*regulating services*): fungsi menjaga kualitas udara, pengaturan iklim, pengaturan air, kontrol erosi, penjernihan air, pengelolaan sampah, kontrol penyakit manusia, kontrol biologi, pengurangan risiko, dll.
- **Jasa Kultural** (*cultural services*): identitas dan keragaman budaya, nilai-nilai religius dan spiritual, pengetahuan (tradisional dan formal), inspirasi, nilai estetika, hubungan sosial, nilai peninggalan pusaka, rekreasi, dll.
- **Jasa Pendukung** (*supporting services*): produksi utama, formasi tanah, produksi oksigen, ketahanan tanah, penyerbukan, ketersediaan habitat, siklus gizi, dll.

—Programa Salvadoreño de Investigación Sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA)

Pembangunan lingkungan yang berorientasi pada perbaikan lingkungan lokal seperti sanitasi lingkungan, industri yang lebih bersih dan rendah emisi, dan kelestarian sumber daya alam

Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi

Pembangunan sosial yang bertujuan pengentasan kemiskinan, pengakuan jati diri dan pemberdayaan masyarakat.



Gambar 9. Keseimbangan Tiga Aspek Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Daniel Murdiyarto, CDM: *Mekanisme Pembangunan Bersih, 2003*

Elastisitas energi adalah perbandingan antara laju pertumbuhan ekonomi sebuah negara dengan pertumbuhan konsumsinya. Semakin kecil angka elastisitas energi, maka semakin efisienlah penggunaan energi di negara tersebut.

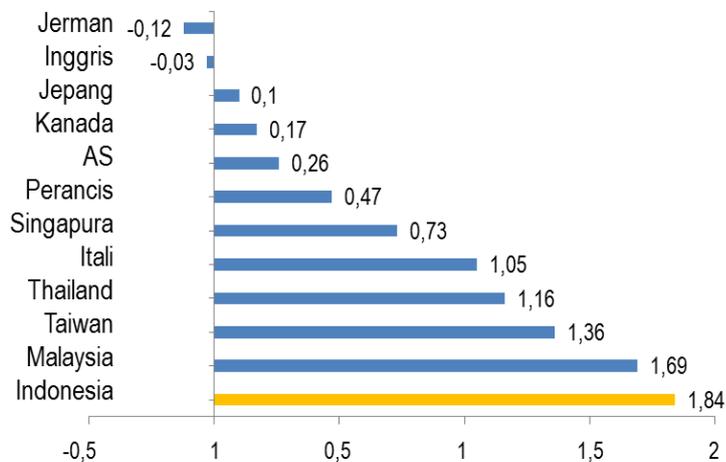
Kenaikan tingkat produktivitas sumber daya

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada peningkatan produktivitas sumber daya yang digunakan, hal mana dapat ditunjukkan antara lain oleh angka elastisitas energi. Data yang tersaji menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara berkembang yang memiliki tren angka elastisitas energinya lebih dari 1 (satu) dimana angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang belum efisien dalam penggunaan energi.

Upaya untuk penurunan angka elastisitas, pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 5 Tahun 2006 yang menargetkan pada tahun 2025 tercapai elastisitas energi kurang dari 1 (satu). Target ini akan dapat dicapai dengan cara memberikan porsi lebih besar pada optimalisasi pemanfaatan energi *mix primer*, memberikan peranan yang lebih besar terhadap sumber energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi.

Grafik 14. Perbandingan Elastisitas Energi Antar Negara Periode 1998-2003

Sumber: ESDM (2006), *Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2006-2025*



KONDISI PEMUNGKIN

Peraturan lingkungan hidup yang mendukung efisiensi sumber daya dan pengelolaan sampah/limbah hasil produksi

Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan tentang pengelolaan sampah yang didasarkan pada penerapan 3R yaitu *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*. Melalui kebijakan tersebut, telah ditetapkan peraturan seperti sanksi pidana bagi pengimpor sampah dan pengelola sampah, pengelolaan gas metana dari sampah seperti pengomposan, dan pengembangan mekanisme *Clean Development Mechanism (CDM)*.

Selain itu juga aturan yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya, peningkatan kualitas sistem AMDAL dan kapasitas infrastruktur pengendalian dampak lingkungan terus ditingkatkan. Karena itu, pengawalan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut menjadi penting untuk mendukung pengurangan limbah yang dapat mencemari lingkungan.

Adanya komitmen dunia usaha secara nasional, regional dan lokal atas pengelolaan sumber daya yang bijaksana dan efisien

Jelas dibutuhkan komitmen dan keberpihakan semua pemangku kepentingan terutama dari dunia usaha untuk menggunakan energi secara efisien. Dengan membangun inisiatif penerapan prinsip industri ramah lingkungan atau *Eco-Industry* dalam setiap aktifitas industri yang dijalankan (dari Hulu-Ke hilir) dunia usaha dapat berkontribusi dalam penggunaan sumber daya secara bijaksana dan efisien.

Kemampuan untuk menetapkan agenda, sasaran, dan indikator peningkatan efisiensi sumber daya serta penghematan biaya

Diyakini bahwa keberlangsungan usaha sektor swasta di masa depan pada iklim kompetisi global yang makin ketat, salah satunya akan didasarkan pada kemampuan sektor usaha dalam meningkatkan kemampuannya untuk menetapkan agenda pemanfaatan sumber daya yang efisien, tepat sasaran dan sekaligus menentukan indikator peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan target penghematan biaya produksi.

Insentif (dan disinsentif) bagi pelaku pengelolaan limbah industri

Pemerintah dapat mendorong perbaikan tata kelola sampah/limbah industri melalui dukungan kebijakan dan pemberian insentif maupun sanksi terhadap cara pengelolaan sampah/limbah oleh sektor industri.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah memberikan kebijakan insentif bagi badan usaha yang melakukan pengelolaan sampah/limbah dengan baik berupa pemberian penghargaan, pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah, pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu, penyertaan modal daerah; dan/atau, pemberian subsidi.

Clean Development Mechanism (CDM) sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif bagi pembangunan kehutanan dan perkebunan adalah mekanisme dibawah Kyoto Protocol/UNFCCC, yang dimaksudkan untuk membantu negara maju/industri memenuhi sebagian kewajibannya menurunkan emisi GHGs; dan membantu negara berkembang dalam upaya menuju pembangunan berkelanjutan dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan konvensi perubahan iklim (UNFCCC).

—Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penerapan industri ramah lingkungan atau *eco-Industry* diharapkan dapat membuat industri semakin kompetitif industri akan dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber dayanya.

Program dan kampanye nasional yang konsisten untuk membentuk pengertian dan perilaku dalam pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan sampah/limbah

Konsistensi kebijakan dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah, diharapkan dapat memberikan dasar pemahaman dan pengertian sehingga dapat mengubah perilaku dalam pemanfaatan sumber daya. Selain itu, komitmen dari pelaku usaha sendiri sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

PERIODE TURBULENSI 2015 – 2020

Pemanfaatan sumber daya industri secara efisien dan menyeluruh

Konsep industri yang berwawasan lingkungan mengutamakan efisiensi dalam proses produksi terutama dalam penggunaan sumber bahan baku, energi, dan air, minimisasi limbah, pemenuhan baku mutu lingkungan serta menggunakan teknologi rendah karbon. Penerapan *eco-industry* melalui penggunaan teknologi rendah karbon memberikan dampak penghematan energi, air dan bahan baku, meningkatkan produktivitas dan menghasilkan limbah yang minimal.

Adopsi dan perluasan penyebaran adaptasi teknologi pengelolaan limbah dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan limbah yang bernilai guna

Mengingat dampak yang dihasilkan dari tidak terkelolanya limbah secara baik terhadap lingkungan perlu kiranya mendorong perluasan penyebaran adaptasi teknologi pengelolaan limbah dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan limbah yang bernilai guna.

Mengingat dampak yang dihasilkan dari tidak terkelolanya limbah secara baik terhadap lingkungan perlu kiranya mendorong perluasan penyebaran adaptasi teknologi pengelolaan limbah dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan limbah yang bernilai guna.

PT. Unilever membangun kerjasama kemitraan dengan Masyarakat Kelurahan Mampang Prapatan 2 RT.04/RW.03 Kompleks Zeni, Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan untuk pengelolaan sampah/limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Pola kemitraan yang dikembangkan PT. Unilever dengan masyarakat mengembangkan pola edukasi pengelolaan sampah terpadu dengan melakukan pemilahan sampah, membuat kompos, membuat kertas daur ulang, mengembangkan tanaman obat keluarga (TOGA) dan lain-lain. Pola edukasi pengelolaan sampah rumah tangga secara terpadu yang digagas oleh kelompok masyarakat dan PT. Unilever dapat menyadarkan masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan lingkungannya yang bersih dan asri.

Pengelolaan sampah/limbah industri dan sampah rumah tangga secara berkelanjutan

Fakta menunjukkan perilaku industri dan masyarakat selama ini begitu abai pada penanganan sampah, mencari cara yang paling mudah dan praktis untuk membuang segera limbah/sampah. Pengelolaan sampah/limbah baik

industri atau rumah tangga harus dimulai dari titik di mana sampah/limbah tersebut diproduksi.

Begitu banyak limbah/sampah yang sesungguhnya masih dapat dimanfaatkan dan masih mempunyai nilai ekonomi. Daur-ulang limbah/sampah dimulai proses rekayasa, rekayasa adalah upaya untuk mendapatkan bahan yang sebaik mungkin sesuai fungsi dari bahan daur-ulang.

Dengan pemisahan dan pengelompokan limbah untuk mendapatkan limbah yang sejenis, sampah yang sudah dipisahkan kemudian dimurnikan untuk mendapatkan bahan atau elemen di dalam sampah. Setelah dimurnikan sampah kemudian memasuki fase pengolahan atau perlakuan yaitu untuk mengolah buangan menjadi bahan yang siap pakai.

Begitu banyak limbah/sampah yang sesungguhnya masih dapat dimanfaatkan dan masih mempunyai nilai ekonomi. Daur-Ulang limbah/sampah dimulai proses rekayasa, rekayasa adalah upaya untuk mendapatkan bahan yang sebaik mungkin sesuai fungsi dari bahan daur-ulang.

PERIODE TRANSFORMASI 2020 – 2050

Adaptasi penuh teknologi dan inovasi pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan sampah/limbah

Dalam peraturan tentang pengelolaan sampah, ditegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Dengan terkelolanya sampah secara komprehensif maka upaya untuk mencapai *zero waste* dapat dilakukan.

Untuk itu, penguasaan teknologi dan inovasi pengelolaan sampah dan limbah menjadi penting untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya alternatif.

Tabel 14. Alternatif Sistem Pengolahan Sampah

Jenis Pengolahan	Kelebihan	Kelemahan	Catatan
Composting (Pengomposan): 1. <i>High Rate</i> (modern)	<ul style="list-style-type: none"> Proses pengomposan lebih cepat. Volume sampah yang terbuang berkurang 	<ul style="list-style-type: none"> Memerlukan peralatan lebih banyak dan kompleks Biaya investasi mahal 	<ul style="list-style-type: none"> Harga kompos yang dihasilkan lebih mahal daripada pupuk kimia Biaya operasi lebih tinggi dari harga jual
	2. <i>Windrow Composting</i> (sederhana)	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memerlukan banyak peralatan Sesuai untuk sampah yang banyak mengandung unsur organik Volume sampah yang terbuang berkurang Biaya investasi lebih murah 	
Baling (Pemadatan)	<ul style="list-style-type: none"> Volume sampah yang terbuang dapat dikurangi Praktis/efisien dalam pengangkutan ke TPA 	<ul style="list-style-type: none"> Biaya investasi, operasi, dan pemeliharaan relatif mahal 	Dianjurkan bila jarak ke pemrosesan akhir lebih dari 25 km

<i>Incinerator</i> (Pembakaran)	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk kapasitas besar hasil sampingan dari pembakaran dapat dimanfaatkan antara lain untuk pembangkit tenaga listrik • Volume sampah menjadi sangat berkurang • Higienis 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya investasi dan operasi mahal • Dapat menimbulkan polusi udara 	Ada 2 (dua) tipe : <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pembakaran berkesinambungan untuk kapasitas besar (>100 ton/hari) • Sistem pembakaran terputus untuk kapasitas kecil (<100 ton/hari)
<i>Recycling</i> (Daur Ulang)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan kembali bahan-bahan (anorganik) yang sudah terpakai • Merupakan lapangan kerja bagi pemulung sampah (informal) • Volume sampah yang terbuang berkurang, menghemat lahan pembuangan akhir 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak semua jenis sampah bisa didaur-ulang. • Memerlukan peralatan yang relatif mahal bila dilaksanakan secara mekanis • Kurang sehat bagi pemulung sampah (informal) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dianjurkan pemisahan mulai dari sumber sampahnya

Sumber: Institut Teknologi Bandung (ITB), 2010

Perubahan paradigma dalam pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan limbah/sampah

Perlu perubahan sudut pandang semua pihak bahwa limbah/sampah industri maupun rumah tangga yang dihasilkan sesungguhnya masih merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Diperlukan penelitian-penelitian dan pengembangan teknologi yang kontinyu dalam rangka melakukan 3R (*Reuse, Recycle, Recovery*) limbah/sampah.

Konsep nilai ekonomis didasarkan pada kelangkaan dan keterbatasan sumber daya di dunia. Konsep ini menggiring semua orang untuk fokus pada bagaimana meningkatkan nilai ekonomi dan bagaimana menguasai sebesar-besarnya manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut.

Konsep dasar kelangkaan dan keterbatasan sumber daya sendiri kemudian tertinggal jauh dari kesadaran umat manusia. Kelangkaan dan keterbatasan seharusnya dimaknai dengan perolehan kebijaksanaan manusia yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya yang ada, tidak hanya bagi kebutuhan generasi sekarang, namun bahkan terutama bagi kebutuhan generasi dunia masa depan yang akan berhadapan dengan situasi di mana populasi penduduk akan semakin besar dan sumber daya pada sisi yang lain yang akan semakin terbatas. Kondisi sulit yang diyakini juga akan dihadapi terutama oleh Indonesia, sebagai bangsa dengan luas wilayah terbesar ke-13 dan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia.

Maka, pembangunan Indonesia harus fokus pencarian titik keseimbangan maksimal antara tujuan peningkatan kesejahteraan manusia, pencapaian keadilan sosial, dan pengurangan risiko kerusakan lingkungan.

Memang, keberhasilan pembangunan tidaklah terletak semata pada targetan laju indikator makro dan mikro ekonomi. Namun kini telah berkembang kesadaran dan pemahaman utuh bahwa pembangunan berkelanjutan terletak hampir sepenuhnya pada pilihan konsep ekonomi yang digunakan. Maka, begitu juga dengan negara ini; pembangunan Indonesia yang berkelanjutan akan sangat ditentukan pada kejelian para pihak, khususnya sektor swasta, dalam menemukan konsep ekonomi dan skema pertumbuhan masa depan yang paling tepat.



PENABULU ALLIANCE merupakan aliansi strategis pengembangan gagasan, inisiatif, dan kegiatan penguatan organisasi masyarakat sipil Indonesia. Aliansi dibangun juga dalam kerangka peningkatan kapasitas setiap anggota dalam upaya menumbuhkan kekuatan bersama dan tergalangnya sumber daya serta partisipasi para pihak secara lebih luas. Ikatan kerjasama dalam aliansi dikembangkan sebagai bentuk 'keterikatan yang lepas', di mana setiap pihak memiliki kebebasan gerak dalam pencapaian tujuannya masing-masing, namun tetap terikat secara kolektif pada visi bersama dalam jangka panjang, yaitu: keberdayaan dan keberlanjutan masyarakat sipil di Indonesia.